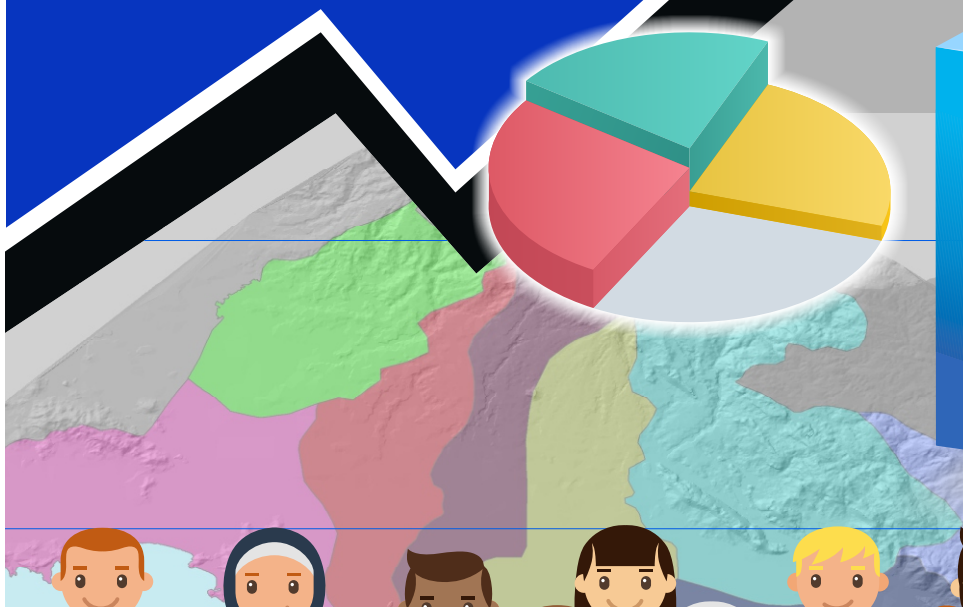




***DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PASAMAN BARAT***

PROFIL

PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2019



SIMPANG EMPAT, TAHUN 2020



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT. atas rahmat dan ridha-Nya sehingga penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 dapat diselesaikan.

Buku ini disusun sebagai tindak lanjut atas Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 474/84558/MD tanggal 20 Desember 2012 perihal Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan yang diamanatkan pada Pasal 5 huruf e Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, Pasal 50 ayat (3) Undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan.

Buku Profil Perkembangan Kependudukan ini berisi gambaran umum tentang kuantitas, kualitas, mobilitas penduduk dan kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Pasaman Barat yang bersumber dari data pelayanan yang dihasilkan dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), database kependudukan nasional yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri berupa Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2019, dan data yang bersumber dari instansi sektoral terkait.

Dengan diterbitkannya buku Profil Perkembangan Kependudukan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat luas, lembaga pemerintah daerah maupun pemerintah pusat serta pemangku kepentingan lain untuk mendukung perencanaan dan peningkatan pelayanan publik serta pembangunan sektor lain.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Pasaman Barat

Tahun 2019 ini. Oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk penyempurnaan buku ini.

Simpang Empat, Oktober 2020

Kepala Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Pasaman Barat



YULISNA, S.H.

NIP. 19650703 199102 2 001



	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penyusunan	1
B. Tujuan	2
C. Ruang Lingkup	3
D. Pengertian	3
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH	9
A. Letak Geografis Daerah	9
B. Kondisi Demografis Daerah	13
C. Gambaran Ekonomi Daerah	16
D. Potensi Daerah	17
BAB III SUMBER DATA DAN KOMPONEN KEPENDUDUKAN	19
A. Sumber Data	19
B. Komponen Kependudukan	19
1. Kuantitas Penduduk	19
a. Persebaran dan Pertumbuhan Penduduk	19
1) Persebaran Penduduk	20
2) Pertumbuhan Penduduk	20
b. Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Demografi	22
1) Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin	22
2) Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio)	25

3) Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio)	27
c. Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Sosial	30
1) Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	30
2) Komposisi Penduduk Menurut Agama	32
3) Komposisi Penduduk Menurut Status Perkawinan	33
a) Angka Perkawinan Kasar	35
b) Angka Perkawinan Umum	35
d. Keluarga	36
1) Penduduk Menurut Status Hubungan Dalam Keluarga ...	36
2) Jumlah Keluarga dan Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga..	37
3) Karakteristik Kepala Keluarga	39
a) Jumlah dan Proporsi Kepala Keluarga Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin	39
b) Jumlah dan Proporsi Kepala Keluarga Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	40
c) Jumlah dan Proporsi Kepala Keluarga Menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin.....	41
d) Jumlah dan Proporsi Kepala Keluarga Menurut Kelompok Umur dan Status Perkawinan	42
e) Jumlah dan Proporsi Kepala Keluarga Menurut Kelompok Umur, Status Perkawinan dan Jenis Kelamin	43
f) Jumlah dan Proporsi Kepala Keluarga Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin	44
g) Jumlah dan Proporsi Kepala Keluarga Menurut Jenis Pekerjaan dan Jenis Kelamin	46
2. Kualitas Penduduk	47
a. Kelahiran (Fertilitas)	47
1) Angka Kelahiran Kasar (<i>Crude Birth Rate</i>)	47



2) Angka Kelahiran Umum (<i>General Birth Rate</i>)	48
3) Rasio Anak dan Perempuan (<i>Child Women Ratio</i>)	49
b. Pendidikan	50
1) Angka Partisipasi Kasar (APK)	50
2) Angka Putus Sekolah (APS)	51
3) Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	51
c. Ekonomi	52
1) Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja	53
2) Angkatan Kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja ..	55
3) Pengangguran	57
d. Sosial	59
3. Mobilitas Penduduk	62
a. Angka Migrasi Masuk	63
b. Angka Migrasi Keluar	64
c. Angka Migrasi Neto	65
4. Kepemilikan Dokumen Kependudukan	67
a. Kepemilikan Kartu Keluarga	67
b. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)	68
c. Kepemilikan Akta	69
1) Akta Kelahiran	69
2) Akta Kematian	70
3) Kepemilikan Akta Perkawinan/ Surat Nikah	71
4) Kepemilikan Akta Perceraian	72
 BAB IV PENUTUP	 74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	74

DAFTAR TABEL		Halaman
Tabel II.1	Jumlah dan Proporsi Penduduk Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin	13
Tabel II.2	Kepadatan Penduduk Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019	15
Tabel II.3	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) di Kabupaten Pasaman Barat, 2015-2019	16
Tabel II.4	Persentase Luas Lahan Menurut Jenis Penggunaannya di Kabupaten Pasaman Barat, 2019 <i>Percentage of Land Area in Pasaman Barat Regency by Kind of Uses, 2019</i>	17
Tabel III.1	Jumlah dan Proporsi Penduduk Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin	20
Tabel III.2	Angka Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019	22
Tabel III.3	Jumlah dan Proporsi Penduduk Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	23
Tabel III.4	Rasio Jenis Kelamin (<i>Sex Ratio</i>) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019	26
Tabel III.5	Jumlah Penduduk Kabupaten Pasaman Barat Menurut Umur Muda, Umur Produktif dan Umur Tua Tahun 2019	29
Tabel III.6.	Jumlah Penduduk Kabupaten Pasaman Barat berusia ≥ 7 Tahun. Tahun 2019 Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin	30



Tabel III.7	Jumlah Penduduk Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Menurut Agama dan Kecamatan		32
Tabel III.8	Jumlah dan Proporsi Penduduk Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Menurut Kecamatan dan Status Perkawinan		33
Tabel III.9	Jumlah Penduduk Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Menurut Kelompok Umur dan Status Perkawinan		34
Tabel III.10	Angka Perkawinan Kasar Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Menurut Kecamatan		35
Tabel III.11	Angka Perkawinan Umum Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Menurut Kecamatan		36
Tabel III.12	Jumlah Penduduk Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Menurut Jenis Kelamin dan Status Hubungan Dalam Keluarga		37
Tabel III.13	Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019		38
Tabel III.14	Jumlah dan Proporsi Kepala Keluarga Kabupaten Pasaman Barat Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2019		39
Tabel III.15	Jumlah dan Proporsi Kepala Keluarga Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin		40
Tabel III.16	Jumlah dan Proporsi Kepala Keluarga Kabupaten Pasaman Barat tahun 2019 Menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin		41
Tabel III.17	Jumlah dan Proporsi Kepala Keluarga Kabupaten Pasaman Menurut Kelompok Umur dan Status Perkawinan Tahun 2019		42

Tabel III.18	Jumlah Kepala Keluarga Kabupaten Pasaman Barat Menurut Kelompok Umur, Status Perkawinan, dan Jenis Kelamin Tahun 2019		42
Tabel III.19	Jumlah dan Proporsi Kepala Keluarga Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Menurut Pendidikan Terakhir dan Jenis Kelamin		45
Tabel III.20	Jumlah dan Proporsi Kepala Keluarga Kab. Pasaman Barat Tahun 2019 Menurut Pekerjaan dan Jenis Kelamin		46
Tabel III.21	Angka Kelahiran Kasar Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Menurut Kecamatan		48
Tabel III.22	Angka Kelahiran Umum Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Menurut Kecamatan		48
Tabel III.23	Rasio Anak dan Perempuan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Menurut Kecamatan		49
Tabel III.24	Angka Partisipasi Kasar SD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019		50
Tabel III.25	Angka Putus Sekolah SD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019		51
Tabel III.26	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019		52
Tabel III.27	Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Menurut Kecamatan		54
Tabel III.28	Jumlah Tenaga Kerja (Penduduk Usia Kerja) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin		54



Tabel III.29	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Menurut Kecamatan		55
Tabel III.30	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin		56
Tabel III.31	Jumlah Pengangguran Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin		58
Tabel III.32	Jumlah Penduduk Penyandang Disabilitas Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Menurut Kecamatan		60
Tabel III.33	Jumlah Migrasi Masuk Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019		63
Tabel III.34	Jumlah Migrasi Masuk Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin		64
Tabel III.35	Jumlah Migrasi Keluar Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019		64
Tabel III.36	Jumlah Migrasi Keluar Kabupaten Pasaman Barat Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2019		65
Tabel III.37	Jumlah Migrasi Netto Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019		66
Tabel III.38	Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Menurut Kecamatan		67
Tabel III.39	Persentase Kepemilikan KTP-el di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Menurut Kecamatan		68

Tabel III.40	Jumlah dan Proporsi Kepemilikan Akta Kelahiran Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Menurut Kecamatan		69
Tabel III.41	Jumlah dan Proporsi Kepemilikan Akta Kematian Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Menurut Kecamatan		70
Tabel III.42	Jumlah dan Proporsi Kepemilikan Akta Perkawinan/Surat Nikah di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Menurut Kecamatan		71
Tabel III.43	Persentase Kepemilikan Akta Perceraian/Surat Cerai di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Menurut Kecamatan		72



DAFTAR GAMBAR			Halaman
<i>Gambar II.1</i>	<i>Jumlah Penduduk Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Menurut Kecamatan</i>		14
<i>Gambar III.1</i>	<i>Piramida Penduduk Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019</i>		25
<i>Gambar III.2</i>	<i>Jumlah Penduduk Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Menurut Umur Muda, Umur Produktif, dan Umur Tua</i>		28
<i>Gambar III.3</i>	<i>Jumlah Penduduk Kabupaten Pasaman Barat Usia ≥ 7 Tahun. Tahun 2019 Menurut Tingkat Pendidikan</i>		32
<i>Gambar III.4</i>	<i>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019</i>		57



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN

Kependudukan merupakan faktor yang sangat strategis dalam pembangunan nasional, hal ini dikarenakan penduduk merupakan pusat dari seluruh kebijaksanaan dan program pembangunan yang dilakukan dan kondisi kependudukan yang ada sangat mempengaruhi dinamika pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Hakekat pembangunan daerah adalah pembangunan masyarakat Kabupaten Pasaman Barat pada khususnya dan masyarakat Provinsi Sumatera Barat pada umumnya, yang mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Dengan demikian, kependudukan pada seluruh dimensinya harus menjadi titik sentral pembangunan yang berkelanjutan agar setiap penduduk dan generasi mendatang dapat hidup sehat, sejahtera, produktif, dan harmonis dengan lingkungannya serta menjadi sumber daya manusia yang berkualitas bagi pembangunan. Pembangunan harus dilakukan oleh penduduk dan untuk penduduk, dan karenanya perencanaan pembangunan yang ideal harus didasarkan pada potensi dan kondisi penduduk di daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan akan mampu memberikan manfaat dan harus dapat dinikmati oleh seluruh penduduk bukan hanya oleh sebagian atau golongan tertentu.

Untuk menunjang perencanaan pembangunan yang baik, diperlukan data dan informasi yang lengkap dan akurat yang berkaitan dengan penduduk baik potensi maupun kondisi penduduk itu sendiri, agar pembangunan dapat berjalan secara efisien dan tepat sasaran, serta berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk baik fisik maupun non fisik. Atau dengan kata lain perencanaan pembangunan yang baik harus aspiratif terhadap data kependudukan dan memandang data kependudukan sebagai data yang sangat penting.

Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 juga mengamanatkan agar pembangunan di bidang kependudukan juga dilakukan melalui pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, yang bertujuan untuk menyediakan data dan informasi kependudukan nasional, provinsi, dan Kabupaten/Kota dan dapat dijadikan acuan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Selain itu Undang-

Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah juga menegaskan bahwa dalam perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, baik yang menyangkut masalah kependudukan, masalah potensi sumber daya daerah maupun informasi lainnya.

Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pasal 17 menyebutkan bahwa perkembangan kependudukan dilakukan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas dan persebaran penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan guna menunjang pelaksanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dalam Pasal 49 ditegaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dan informasi mengenai kependudukan dan keluarga. Data dan informasi kependudukan dan keluarga tersebut wajib digunakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan dan pembangunan.

Berkenaan dengan penyajian data dan informasi perkembangan kependudukan terutama untuk perencanaan pembangunan manusia, baik itu pembangunan ekonomi, sosial, politik, lingkungan, dan lain-lain yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan manusia, maka data dan informasi perlu menggunakan data yang valid dan dapat dipercaya baik dari sisi jumlah maupun kualitas data dan dikemas secara baik, sederhana, informatif dan tepat waktu dalam bentuk profil perkembangan kependudukan yang disajikan secara berkelanjutan sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan. Profil perkembangan kependudukan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi kependudukan Kabupaten Pasaman Barat serta prediksi prospek kependudukan dimasa yang akan datang.

B. TUJUAN

Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 ini disusun dengan memanfaatkan data registrasi yang dihasilkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), Data Konsolidasi Bersih Semester 2 Tahun 2019 yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan sumber data lintas sektoral lainnya, yang bertujuan untuk :

1. Memberikan gambaran umum mengenai kondisi dan potensi kependudukan wilayah Kabupaten Pasaman Barat;



2. Membantu para pengambil kebijakan dalam pengambilan keputusan yang tepat dalam proses pembangunan;
3. Menyediakan data dan informasi bagi pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam merumuskan dan menyusun kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan dan evaluasi kebijakan serta perencanaan program/kegiatan dan untuk kalangan akademisi, pelaku bisnis dan peminat demografi.

C. RUANG LINGKUP

Mengingat luasnya cakupan masalah kependudukan, maka ruang lingkup penyusunan perkembangan kependudukan di Kabupaten Pasaman Barat ini meliputi perkembangan kependudukan Tahun 2019 dengan cakupan data antara lain :

1. Kuantitas penduduk, meliputi persebaran dan kepadatan penduduk; komposisi penduduk menurut karakteristik demografi; komposisi penduduk menurut karakteristik sosial; dan keluarga;
2. Kualitas penduduk meliputi kelahiran, pendidikan, ekonomi dan sosial;
3. Mobilitas penduduk meliputi migrasi masuk, migrasi keluar, dan migrasi netto;
4. Kepemilikan dokumen kependudukan.

D. PENGERTIAN

Dalam rangka memberikan kesamaan persepsi tentang beberapa istilah yang digunakan maka beberapa pengertian umum yang ada dalam penyusunan profil kependudukan ini adalah sebagai berikut :

1. **Penduduk** adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia;
2. **Kependudukan** adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat;
3. **Perkembangan Kependudukan** adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan;

4. **Data Kependudukan** adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
5. **Profil Perkembangan Kependudukan** adalah gambaran kondisi, perkembangan dan prospek kependudukan;
6. **Administrasi Kependudukan** adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;
7. **Kuantitas Penduduk** adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati dan pindah tempat;
8. **Kualitas Penduduk** adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik serta ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang berbudaya, berkepribadian dan layak;
9. **Mobilitas Penduduk** adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas administrasi Daerah Tingkat II;
10. **Persebaran Penduduk** adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan;
11. **Kematian atau Mortalitas Menurut WHO** adalah suatu peristiwa menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup;
12. **Mobilitas Penduduk Permanen (migrasi)** adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif (migrasi internal) atau batas politik/negara (migrasi internasional);
13. **Mobilitas penduduk non permanen (circulation/sirkuler)** adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk tidak menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif. Mobilitas penduduk non permanen dibagi menjadi dua yaitu ulang-alik atau nglaju (*commuting*) dan menginap/mondok;
14. **Penduduk Musiman** merupakan salah satu jenis mobilitas penduduk non permanen yang bekerja tidak pada daerah domilisinya dan menetap dalam kurun waktu lebih dari satu hari tetapi kurang dari satu tahun dan dilakukan secara berulang;



15. **Mobilitas penduduk ulang-alik atau nglaju (*commuting*)** adalah gerak penduduk dari daerah asal ke daerah tujuan dalam batas waktu tertentu dan kembali ke daerah asal pada hari yang sama;
16. **Migrasi kembali (*return migration*)** adalah banyaknya penduduk yang pada waktu diadakan sensus bertempat tinggal di daerah yang sama dengan tempat lahir dan pernah bertempat tinggal di daerah yang berbeda;
17. **Migrasi semasa hidup (*life time migration*)** adalah bentuk migrasi dimana pada waktu diadakan sensus tempat tinggal sekarang berbeda dengan tempat kelahirannya;
18. **Migrasi Risen (*recent migration*)** adalah bentuk migrasi melewati batas wilayah administrasi (desa/kec/kab/provinsi) dimana pada waktu diadakan sensus bertempat tinggal di daerah yang berbeda dengan tempat tinggal lima tahun yang lalu;
19. **Urbanisasi** adalah suatu proses bertambahnya konsentrasi penduduk di Kabupaten dan atau proses perubahan suatu daerah pedesaan menjadi Kabupaten, baik secara fisik maupun ukuran-ukuran spesial dan/atau bertambahnya fasilitas Kabupaten, serta lembaga-lembaga sosial, maupun perilaku masyarakatnya;
20. **Penduduk Usia Kerja** adalah penduduk yang berusia 15 tahun sampai dengan 64 tahun;
21. **Penduduk yang termasuk angkatan kerja** adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha.
22. **Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja** adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga dan melaksanakan kegiatan lainnya.
23. **Bekerja** adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam terus-menerus dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.
24. **Tingkat partisipasi angkatan kerja** adalah proporsi angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja;
25. **Mencari pekerjaan atau penganggur terbuka** adalah kegiatan seseorang yang tidak bekerja dan pada saat survei orang tersebut sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha.

26. **Sekolah** adalah kegiatan seseorang untuk bersekolah di sekolah formal, mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tertinggi, selama seminggu yang lalu sebelum pencacahan. Termasuk pula kegiatan dari mereka yang sedang libur sekolah.
27. **Mengurus rumah tangga** adalah kegiatan seseorang yang mengurus rumah tangga tanpa mendapatkan upah, misalnya : ibu-ibu rumah tangga, dan anaknya yang membantu rumah tangga. Sebaliknya pembantu rumah tangga yang mendapat upah walaupun pekerjaannya mengurus rumah tangga dianggap bekerja.
28. **Pendidikan tertinggi yang ditamatkan** adalah tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi suatu tingkatan sekolah dengan mendapatkan tanda tamat (ijazah).
29. **Status pekerjaan** adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan.
30. **Angka pengangguran** adalah proporsi jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja;
31. **Bukan Angkatan Kerja** adalah penduduk usia 15 tahun kebawah dan penduduk berusia 64 tahun ke atas;
32. **Lahir hidup** adalah :
 - a. Suatu kelahiran bayi tanpa memperhitungkan lamanya didalam kandungan, dimana si bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan pada saat dilahirkan, misalnya ada nafas, ada denyut jantung atau denyut tali pusar atau gerakan otot;
 - b. Banyaknya kelahiran hidup dari sekelompok atau beberapa kelompok wanita selama masa reproduksinya;
33. **Lahir mati** adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 minggu tanpa menunjukan tanda-tanda kehidupan pada saat dilahirkan;
34. **Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)** adalah rata-rata banyaknya anak yang akan dimiliki oleh seorang wanita pada masa reproduksinya jika ia mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung;
35. **Angka Kematian Kasar** adalah banyaknya kematian yang terjadi pada suatu tahun tertentu untuk setiap 1.000 penduduk;
36. **Angka Partisipasi Total** adalah proporsi penduduk bersekolah menurut golongan umur sekolah yaitu umur 7-12, 13-15, 16-18, dan 19-24 tahun;
37. **Angka Partisipasi Murni/APM** adalah presentase jumlah peserta didik SD usia 7-12 tahun, jumlah peserta didik SLTP usia 13-15 tahun, jumlah peserta didik SLTA usia 16-



- 18 tahun dan jumlah peserta didik PTN/PTS usia 19-24 tahun dibagi jumlah penduduk kelompok usia dari masing-masing jenjang pendidikan;
38. **Angka Partisipasi Kasar/APK** adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu;
 39. **Pertumbuhan penduduk** adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan mengurangi jumlah penduduk di suatu wilayah, dimana pertumbuhan penduduk tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah dan migrasi neto;
 40. **Angka Pertumbuhan Penduduk** adalah besaran persentase perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk pada waktu sebelumnya;
 41. **Proporsi penduduk** adalah jumlah dan informasi penduduk menurut pengelompokan tertentu, seperti umur dan jenis kelamin;
 42. **Rasio jenis kelamin** adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan banyaknya jumlah penduduk laki-laki dan banyaknya jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dalam waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan;
 43. **Piramida penduduk** adalah gambar yang menunjukkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin yang disajikan secara grafik;
 44. **Rasio ketergantungan atau rasio beban tanggungan (dependency ratio)** adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia dibawah 15 tahun dan penduduk usia 65 tahun atau lebih) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun). Rasio ketergantungan menunjukkan beban yang harus ditanggung oleh penduduk produktif terhadap penduduk tidak produktif;
 45. **Rasio kepadatan penduduk** adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk terhadap luas wilayah atau berapa banyaknya penduduk per kilometer persegi pada periode tahun tertentu;
 46. **Angka Perkawinan Kasar** adalah angka yang menunjukkan persentase penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun pada suatu tahun tertentu;

47. **Angka Perkawinan umum** adalah angka yang menunjukkan proporsi penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas pada suatu tahun tertentu;



BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

Menurut sejarahnya, nama Kabupaten Pasaman Barat diambil dari nama sebuah gunung yang terdapat di daerah Kabupaten Pasaman. Selain itu juga terdapat sebuah sungai yang bernama sungai Pasaman. Kata Pasaman sendiri berasal dari kata “Pasamoan” yang berarti kesepakatan atau kesamaan pendapat antar golongan etnis penduduk yang mendiami wilayah Pasaman yaitu Minangkabau, Mandailing dan Jawa.

Sebenarnya secara kultural cukup banyak perbedaan antara Suku Minangkabau, Suku Mandailing dan Suku Jawa. Perbedaan ini dibidang adat istiadat, bahasa, sikap dan perilaku hidup. Namun dibalik perbedaan itu, banyak pula kesamaan visi dan persepsi sehingga masyarakat Pasaman Barat dapat hidup berdampingan dalam kerukunan dan kedamaian.

Setelah lebih dari setengah abad, akhirnya dengan adanya otonomi daerah Pasaman dimekarkan menjadi dua kabupaten berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 38 Tahun 2003 tersebut, Kabupaten Pasaman Barat (sebagai Kabupaten Pemekaran) resmi berpisah dari Kabupaten Pasaman (sebagai Kabupaten Induk) pada tanggal 7 Januari 2004, yang ditandai dengan pelantikan Pejabat Pelaksana Tugas Bupati Pasaman Barat.

Saat ini Kabupaten Pasaman Barat, telah berubah menjadi salah satu daerah yang berkembang pesat dan menjadi “mutiara” di provinsi Sumatera Barat.

A. Letak Geografis Daerah

Kabupaten Pasaman Barat memiliki luas 3.887,77 km² atau setara dengan 9,21% dari luas total Propinsi Sumatera Barat. Sedangkan secara geografis Kabupaten Pasaman Barat berada pada garis lintasan khatulistiwa (equator) antara 0°33' Lintang Utara sampai dengan 0°11' Lintang Selatan serta 99°10' Bujur Timur sampai dengan 100°04' Bujur Timur. Kondisi topografi wilayah Kabupaten Pasaman Barat terdiri atas dataran rendah dan dataran tinggi dengan ketinggian bervariasi dari 0 sampai dengan 450 meter di atas permukaan laut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Mandailing Natal (Propinsi Sumatera Utara).
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pasaman.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Agam.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia (garis pantai ± 152 km).



Sedangkan secara administrasi pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari 11 Kecamatan dan 19 Nagari. Adapun data yang lebih terperinci tentang administrasi pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat khususnya jumlah Kecamatan dan Nagari adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan Sungai Beremas

Kecamatan Sungai Beremas memiliki luas wilayah 440,48 Km² atau 11,33% dari luas wilayah Kabupaten Pasaman Barat dan mempunyai penduduk sebanyak 27.491 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata penduduk di Kecamatan Sungai Beremas adalah 62,41 jiwa/km². Kecamatan Sungai Beremas terdiri dari 1 (satu) Nagari yaitu Nagari Aia Bangih.

2. Kecamatan Lembah Melintang

Kecamatan Lembah Melintang memiliki luas wilayah 263,77 Km² atau 6,78% dari luas wilayah Kabupaten Pasaman Barat dan mempunyai penduduk sebanyak 49.959 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata penduduk di Kecamatan Lembah Melintang adalah



189,40 jiwa/km². Kecamatan Lembah Melintang terdiri dari 1 (satu) Nagari yaitu Nagari Ujung Gading.

3. Kecamatan Pasaman

Kecamatan Pasaman memiliki luas wilayah 508,93 Km² atau 13,09% dari luas wilayah Kabupaten Pasaman Barat dan mempunyai penduduk sebanyak 75.970 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata penduduk di Kecamatan Pasaman adalah 149,27 jiwa/km². Kecamatan Pasaman terdiri dari 3 (tiga) Nagari yaitu :

1. Nagari Lingkuang Aua
2. Nagari Aua Kuniang
3. Nagari Aia Gadang

4. Kecamatan Talamau

Kecamatan Talamau memiliki luas wilayah 324,24 Km² atau 8,34% dari luas wilayah Kabupaten Pasaman Barat dan mempunyai penduduk sebanyak 30.599 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata penduduk di Kecamatan Talamau adalah 94,37 jiwa/km². Kecamatan Talamau terdiri dari 3 (tiga) Nagari yaitu :

- 1) Nagari Kajai
- 2) Nagari Talu
- 3) Nagari Sinuruik

5. Kecamatan Kinali

Kecamatan Kinali memiliki luas wilayah 482,64 Km² atau 12,41% dari luas wilayah Kabupaten Pasaman Barat dan mempunyai penduduk sebanyak 71.121 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata penduduk di Kecamatan Kinali adalah 147,36 jiwa/km². Kecamatan Kinali terdiri dari 2 (dua) Nagari yaitu :

- 1) Nagari Kinali
- 2) Nagari Katiagan

6. Kecamatan Gunung Tuleh

Kecamatan Gunung Tuleh memiliki luas wilayah 453,97 Km² atau 11,68% dari luas wilayah Kabupaten Pasaman Barat dan mempunyai penduduk sebanyak 24.805 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata penduduk di Kecamatan Gunung Tuleh adalah 54,64 jiwa/ km². Kecamatan Gunung Tuleh terdiri dari 2 (dua) Nagari yaitu :

- 1) Nagari Muaro Kiawai
- 2) Nagari Rabi Jonggor

7. Kecamatan Ranah Batahan

Kecamatan Ranah Batahan memiliki luas wilayah 354,88 Km² atau 9,13% dari luas wilayah Kabupaten Pasaman Barat dan mempunyai penduduk sebanyak 27,425 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata penduduk di Kecamatan Ranah Batahan adalah 77,28 jiwa/ km². Kecamatan Ranah Batahan terdiri dari 2 (dua) Nagari yaitu :

- 1) Nagari Batahan
- 2) Nagari Desa Baru

8. Kecamatan Koto Balingka

Kecamatan Koto Balingka memiliki luas wilayah 340,78 Km² atau 8,77% dari luas wilayah Kabupaten Pasaman Barat dan mempunyai penduduk sebanyak 30.716 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata penduduk di Kecamatan Koto Balingka adalah 85,28 jiwa/ km². Kecamatan Koto Balingka terdiri dari 1 (satu) Nagari yaitu Nagari Parik.

9. Kecamatan Sungai Aur

Kecamatan Sungai Aur memiliki luas wilayah 420,16 Km² atau 10.81 % dari luas wilayah Kabupaten Pasaman Barat dan mempunyai penduduk sebanyak 35.830 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata penduduk di Kecamatan Sungai Aur adalah 85,28 jiwa/ km². Kecamatan Sungai Aur terdiri dari 1 (satu) Nagari yaitu Nagari Sungai Aua.

10. Kecamatan Luhak Nan Duo

Kecamatan Luhak Nan Duo memiliki luas wilayah 174,21 Km² atau 4,48% dari luas wilayah Kabupaten Pasaman Barat dan mempunyai penduduk sebanyak 44.509 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata penduduk di Kecamatan Luhak Nan Duo adalah 255,49 jiwa/km². Kecamatan Luhak Nan Duo terdiri dari 2 (dua) Nagari yaitu :

1. Nagari Koto Baru
2. Nagari Kapa

11. Kecamatan Sasak Ranah Pesisir

Kecamatan Sasak Ranah Pesisir memiliki luas wilayah 123,71 Km² atau 3,18% dari luas wilayah Kabupaten Pasaman Barat dan mempunyai penduduk sebanyak 15.336 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata penduduk di Kecamatan Sasak Ranah Pesisir adalah 123,97 jiwa/km². Kecamatan Sasak Ranah Pesisir terdiri dari 1 (satu) Nagari yaitu Nagari Sasak.



Topografi wilayah Kabupaten Pasaman Barat meliputi daerah datar, bergelombang, berbukit dan pegunungan. Perbukitan dan pegunungan terdapat pada sebagian besar wilayah Kecamatan yang berbatas dengan Kabupaten Pasaman di bagian timur dan Kabupaten Mandailing Natal di bagian utara. Wilayah topografi datar meliputi daerah Barat dari seluruh kecamatan yang berbatas dengan Samudera Hindia yaitu Kecamatan Kinali, Luhak Nan Duo, Sasak Ranah Pasisie, Pasaman, Sungai Aua, Lembah Melintang, Koto Balingka dan Sungai Beremas.

Kabupaten Pasaman Barat terletak pada ketinggian antara 0 – 2.192 meter di atas permukaan laut. Gunung tertinggi di Kabupaten Pasaman Barat adalah Gunung Talamau dengan ketinggian 2.192 meter di atas permukaan laut.

Tanah Pasaman Barat yang subur terbentang dari utara ke selatan sangat cocok untuk pertanian dalam arti luas perkebunan, tanaman pangan, peternakan dan perikanan, sehingga dengan kata lain dapat disebut sebagai pusat agro bisnis. Dengan berkembangnya agro bisnis tentunya melahirkan kegiatan agro industri.

B. Kondisi Demografis Daerah

Persoalan kependudukan merupakan persoalan yang berkaitan dengan persebaran penduduk, karena jumlahnya yang sangat besar dan pertumbuhan yang relatif masih tinggi. Persoalan ini tidak hanya terjadi pada tingkat nasional akan tetapi juga pada tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/Kota.

Kabupaten Pasaman Barat dengan luas wilayah 3.887.77 km² didiami penduduk sebanyak 433.761 jiwa, terdiri dari 219.843 jiwa laki-laki dan 213.918 jiwa perempuan. Apabila dilihat dari persebaran penduduk di 11 (sebelas) kecamatan selama tahun 2019, dapat dilihat bahwa distribusi jumlah penduduk pada tahun 2019 ini sebagian besar tinggal di Kecamatan Pasaman yakni 17,51%, Kecamatan Kinali yakni 16,40%, dan Kecamatan Lembah Melintang yakni 11,52%. Sedangkan Kecamatan dengan persentase penduduk terkecil adalah Kecamatan Sasak Ranah Pesisir yakni 3,54%.

Tabel II.1 Jumlah dan Proporsi Penduduk Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin

NO	KECAMATAN	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
		n(Jiwa)	n(Jiwa)	n(Jiwa)
1	SUNGAI BEREMAS	14,115	13,376	27,491
2	LEMBAH MELINTANG	25,053	24,906	49,959

3	PASAMAN	38,309	37,661	75,970
4	TALAMAU	15,692	14,907	30,599
5	KINALI	36,282	34,839	71,121
6	GUNUNG TULEH	12,581	12,224	24,805
7	RANAH BATAHAN	13,782	13,643	27,425
8	KOTO BALINGKA	15,430	15,286	30,716
9	SUNGAI AUR	18,196	17,634	35,830
10	LUHAK NAN DUO	22,598	21,911	44,509
11	SASAK RANAH PESISIR	7,805	7,531	15,336
KABUPATEN PASAMAN BARAT		219,843	213,918	433,761

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester 2 Tahun 2019 Ditjen Duk-Capil Kemendagri, diolah

Gambar II.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Menurut Kecamatan



Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester 2 Tahun 2019 Ditjen Duk-Capil Kemendagri, diolah

Jika diperhatikan menurut jenis kelamin, terlihat bahwa komposisi jumlah penduduk Kabupaten Pasaman Barat dimana jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan perempuan.

Kepadatan penduduk merupakan kondisi yang mengalami perubahan dari tahun ke tahun karena perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah baik secara alami maupun karena perpindahan penduduk dari daerah satu ke daerah lainnya. Indikator kepadatan penduduk berguna untuk melihat kerapatan jumlah penduduk dalam satu kesatuan keruangan.

Rasio kepadatan penduduk (*density ratio*) yaitu angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk terhadap luas wilayah atau berapa banyaknya penduduk per kilometer persegi pada periode tahun tertentu. Untuk menghitung rasio kepadatan penduduk atau jumlah rata-rata penduduk setiap km² ini, digunakan rumus yaitu Jumlah Penduduk (jiwa) dibagi dengan Luas wilayah (km²) atau melalui rumus sebagai berikut :



$$D = \frac{P}{A}$$

D = Rasio Kepadatan Penduduk (jiwa/km²)

P = Jumlah Penduduk (jiwa)

A = Luas Wilayah (Km²)

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk tiap-tiap daerah atau wilayah, antara lain :

1) Faktor fisiografis

Penduduk selalu memilih tempat tinggal yang baik, strategis, tanah subur, relief baik, cukup air dan daerah aman.

2) Faktor biologi

Tingkat pertumbuhan penduduk berbeda-beda karena adanya perbedaan tingkat kematian, tingkat kelahiran dan angka perkawinan.

3) Faktor kebudayaan dan teknologi

Daerah yang masyarakatnya maju, pola berfikirnya bagus, dan keadaan pembangunan fisiknya maju, maka akan tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan daerah terbelakang.

Berdasarkan tingkat kepadatan, Kabupaten Pasaman Barat tergolong Kabupaten yang tidak begitu padat penduduknya. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah yang memperlihatkan kepadatan penduduk di Kabupaten Pasaman Barat, dengan luas 3.887,77 km², Kabupaten Pasaman Barat didiami oleh 433.761 jiwa atau dengan kepadatan sebesar 111,57 jiwa/km². Dengan kata lain rata-rata setiap km² luas wilayah Kabupaten Pasaman Barat didiami oleh 111 sampai dengan 112 jiwa.

Jika dilihat kepadatan penduduk per Kecamatan, maka terlihat bahwa Kecamatan Luhak Nan Duo merupakan wilayah terpadat dengan kepadatan sebesar 255,49 jiwa/km², diikuti oleh Kecamatan Lembah Melintang sebesar 189,40 jiwa/km² serta Kecamatan Pasaman sebesar 149,27 jiwa/km².

Tabel II.2 Kepadatan Penduduk Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019

NO	KECAMATAN	PENDUDUK (JIWA)	LUAS WILAYAH (km2)	KEPADATAN (JIWA/km2)
1	SUNGAI BEREMAS	27,491	440.48	62.41
2	LEMBAH MELINTANG	49,959	263.77	189.40
3	PASAMAN	75,970	508.93	149.27

4	TALAMAU	30,599	324.24	94.37
5	KINALI	71,121	482.64	147.36
6	GUNUNG TULEH	24,805	453.97	54.64
7	RANAH BATAHAN	27,425	354.88	77.28
8	KOTO BALINGKA	30,716	340.78	90.13
9	SUNGAI AUR	35,830	420.16	85.28
10	LUHAK NAN DUO	44,509	174.21	255.49
11	SASAK RANAH PESISIR	15,336	123.71	123.97
TOTAL		433,761	3,887.77	111.57

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester 2 Tahun 2019 Ditjen Duk-Capil Kemendagri, diolah

Berdasarkan klasifikasi kepadatan penduduk yang membagi empat klasifikasi kepadatan penduduk, yaitu: tidak padat, dengan tingkat kepadatan 1 – 50 jiwa/ km²; kurang padat antara 51 – 250 jiwa/ km²; cukup padat 251 – 400 jiwa/ km²; dan sangat padat dengan tingkat kepadatan lebih besar dari 401 jiwa/km². maka Kabupaten Pasaman Barat tergolong daerah yang berpenduduk kurang padat yaitu 111,57 jiwa/km².

C. Gambaran Ekonomi Daerah

Struktur perekonomian Kabupaten Pasaman Barat tercermin dari peranan masing - masing sektor terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihasilkan.

PDRB adalah salah satu data yang dapat digunakan sebagai indikator untuk melihat tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat pendapatan regional / PDRB per kapita, perubahan/pergeseran struktur perekonomian, tingkat inflasi dan kemakmuran penduduk suatu daerah.

Tabel II.3 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) di Kabupaten Pasaman Barat, 2015–2019

Lapangan Usaha/Industry		2015	2016	2017	2018 *	2019 **
	-1	-2	-3	-4	-5	-6
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	5 191,69	5 610,55	5 936,13	6 252,94	6 310,38
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	209,06	220,06	232,75	256,46	281,10
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	1 855,01	2 007,72	2 113,75	2 163,03	2 014,16
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	2,61	3,07	3,22	3,43	3,96
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	1,25	1,41	1,51	1,62	1,77



F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	757,81	830,01	915,03	1 009,04	1 165,65
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	1 275,14	1 429,25	1 550,57	1 718,92	1 944,09
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	560,87	619,77	676,06	736,49	855,66
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	60,99	71,68	79,40	88,25	104,82
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	487,25	540,23	610,65	682,88	790,29
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	230,26	257,12	265,67	273,74	294,79
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	169,51	186,03	197,16	212,00	240,26
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	6,80	7,46	7,96	8,50	9,49
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	443,50	489,39	541,60	584,67	670,74
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	266,65	305,79	332,12	356,39	416,74
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	125,69	135,47	148,27	161,44	184,31
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	68,86	79,26	87,86	97,43	112,76
Produk Domestik Bruto/ Gross Domestic Product		11 712,94	12 794,25	13 699,70	14 607,23	15 400,99

Catatan/Note : *Angka Sementara **angka sangat sementara

Sumber/Source : PDRB Kabupaten Pasaman Barat/GRDP of Pasaman Barat

PDRB Pasaman Barat atas dasar harga berlaku tahun 2019 menurut lapangan usaha (miliar rupiah) angka sangat sementara sebesar 15.400,99 dan angka sementara tahun 2018 adalah 14.607,23.

Dari seluruh sektor yang memberikan sumbangan dalam pembentukan PDRB Pasaman Barat atas dasar harga berlaku, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan andil terbesar yaitu 6.310,38 pada tahun 2019 dan tahun 2018 adalah 6.252,94

D. POTENSI DAERAH

Tabel II.4 Persentase Luas Lahan Menurut Jenis Penggunaannya di Kabupaten Pasaman Barat, 2019

Percentage of Land Area in Pasaman Barat Regency by Kind of Uses, 2019

Jenis Penggunaan / Kind of Uses	Luas/Area (Ha)	Persentase / Percentage (%)
-1	-2	-3
1. Lahan Sawah	11, 628	2,99
a. Irigasi	8, 409	2,16

b. Tadah hujan	3,219	0,82
c. Rawa pasang surut	-	-
d. Rawa lebak	-	-
2. Lahan Pertanian Bukan Sawah	327,698	84,29
a. Tegal/kebun	18,502	4,76
b. Ladang/huma	12,042	3,10
c. Perkebunan	156,605	40,28
d. Ditanami pohon/hutan rakyat	17,861	4,59
e. Padang penggembalaan/ padang rumput	631	0,16
f. Hutan negara	102,059	26,25
g. Sementara tidak diusahakan	2,299	0,59
h. Lainnya	17,699	4,55
3. Lahan Bukan Pertanian	49,451	12,72
Pasaman Barat	388,777	100,00

Sumber/Source: Survey Pertanian - Lahan / Agriculture Survey-Land Area

**BAB III****SUMBER DATA DAN KOMPONEN KEPENDUDUKAN****A. SUMBER DATA**

Hasil dari pemanfaatan database kependudukan pada dasarnya mencakup struktur umur, komposisi dan persebaran penduduk. Dari struktur umur dapat diturunkan (dihitung) berbagai indikator seperti umur median (*median age*), rasio jenis kelamin (*sex ratio*), piramida penduduk, rasio ketergantungan (*dependency ratio*), dan indikator lainnya. Dari komposisi penduduk, database kependudukan dapat memberikan informasi dari aspek sosial seperti pendidikan, status perkawinan, agama dan status hubungan dalam rumah tangga. Sedangkan dari aspek penyebaran penduduk memperlihatkan bagaimana distribusi penduduk menurut Kecamatan.

Adapun database kependudukan yang telah diolah ini bersumber dari database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang terintegrasi dengan database e-KTP dan telah dibersihkan (dikonsolidasikan) secara nasional oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri untuk posisi per 31 Desember 2018 dan data yang berasal dari OPD dan Instansi teknis (lintas sektor) terkait yaitu BPS, Badan Perencanaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman Barat.

Publikasi informasi perkembangan kependudukan berupa jumlah penduduk, struktur dan komposisi penduduk, distribusi dan kepadatan penduduk. Komposisi penduduk dapat berupa data kuantitas penduduk mencakup bidang kependudukan, pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial dan administrasi kependudukan dilakukan secara periodik untuk memberikan informasi pada stakeholder disetiap level pemerintahan.

B. KOMPONEN KEPENDUDUKAN**1. Kuantitas Penduduk****a. Persebaran dan Pertumbuhan Penduduk**

Persoalan kependudukan merupakan persoalan yang berkaitan dengan persebaran penduduk, karena jumlahnya yang sangat besar dan pertumbuhan yang relatif masih tinggi. Persoalan ini tidak hanya terjadi pada tingkat nasional akan tetapi juga pada tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/Kota.

1) Persebaran Penduduk

Persebaran (distribusi) penduduk adalah kondisi sebaran penduduk menurut keruangan. Dapat pula dikatakan bahwa persebaran atau distribusi penduduk bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara, apakah tersebar merata atau tidak. Sementara itu, penyebaran adalah upaya mengubah persebaran penduduk agar serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Kabupaten Pasaman Barat dengan luas wilayah 3.887.77 km² didiami penduduk sebanyak 433.761 jiwa, terdiri dari 219.843 jiwa laki-laki dan 213.918 jiwa perempuan. Apabila dilihat dari persebaran penduduk di 11 (sebelas) kecamatan selama tahun 2019, dapat dilihat bahwa distribusi jumlah penduduk pada tahun 2019 ini sebagian besar tinggal di Kecamatan Pasaman yakni 17,51%, Kecamatan Kinali yakni 16,40%, dan Kecamatan Lembah Melintang yakni 11,52%. Sedangkan Kecamatan dengan persentase penduduk terkecil adalah Kecamatan Sasak Ranah Pesisir yakni 3,54%.

Tabel III.1 Jumlah dan Proporsi Penduduk Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin

NO	KECAMATAN	JENIS KELAMIN				JUMLAH	
		LAKI-LAKI		PEREMPUAN			
		n(JIWA)	%	n(JIWA)	%	n(JIWA)	%
1	SUNGAI BEREMAS	14,115	6.42	13,376	6.25	27,491	6.34
2	LEMBAH MELINTANG	25,053	11.40	24,906	11.64	49,959	11.52
3	PASAMAN	38,309	17.43	37,661	17.61	75,970	17.51
4	TALAMAU	15,692	7.14	14,907	6.97	30,599	7.05
5	KINALI	36,282	16.50	34,839	16.29	71,121	16.40
6	GUNUNG TULEH	12,581	5.72	12,224	5.71	24,805	5.72
7	RANAH BATAHAN	13,782	6.27	13,643	6.38	27,425	6.32
8	KOTO BALINGKA	15,430	7.02	15,286	7.15	30,716	7.08
9	SUNGAI AUR	18,196	8.28	17,634	8.24	35,830	8.26
10	LUHAK NAN DUO	22,598	10.28	21,911	10.24	44,509	10.26
11	SASAK RANAH PESISIR	7,805	3.55	7,531	3.52	15,336	3.54
KABUPATEN PASAMAN BARAT		219,843	100	213,918	100	433,761	100

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester 2 Tahun 2019 Ditjen Duk-Capil Kemendagri, diolah

2) Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan mengurangi jumlah penduduk disuatu wilayah, dimana pertumbuhan penduduk tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah dan migrasi netto. Secara terus menerus jumlah penduduk akan dipengaruhi oleh banyaknya bayi yang lahir (menambah jumlah penduduk) tetapi



disisi lain akan dikurangi oleh jumlah kematian yang terjadi pada semua kelompok umur. Sementara itu migrasi juga berperan dalam mempengaruhi jumlah dimana penduduk imigran (pendatang) akan menambah dan emigran (penduduk yang keluar) akan mengurangi jumlah penduduk. Jadi, pertumbuhan penduduk diakibatkan oleh tiga komponen demografi, yaitu *Fertilitas, Mortalitas, dan Migrasi* (Masuk/*immigration* dan keluar/*outmigration*). Selisih antara fertilitas dan mortalitas disebut perubahan reproduktif (*reproductive change*) atau pertumbuhan alamiah (*natural growth*), sedangkan selisih antara migrasi masuk dan migrasi keluar disebut migrasi netto (*net migration*).

Berdasarkan data tersebut, maka untuk menghitung jumlah penduduk dapat menggunakan rumus :

$$P_t = P_o + (B-D) = (M_i - M_o)$$

P_t	= Jumlah penduduk pada tahun t
P_o	= Jumlah Penduduk pada tahun dasar (o)
B (birth)	= Jumlah kelahiran selama periode $o-t$
D (death)	= Jumlah kematian selama periode $o-t$
M_i	= Jumlah migrasi masuk selama periode $o-t$
M_o	= Jumlah migrasi keluar selama periode $o-t$

Namun demikian, dengan telah berjalannya sistem registrasi penduduk melalui pelayanan pendaftaran penduduk, maka data jumlah penduduk dapat diketahui secara langsung dari database kependudukan melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SI/AK).

Pertumbuhan penduduk adalah besaran persentase perubahan jumlah penduduk disuatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk pada waktu sebelumnya. Angka pertumbuhan penduduk merupakan angka yang menggambarkan penambahan penduduk yang dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah maupun migrasi penduduk. Indikator laju pertumbuhan penduduk berguna untuk melihat kecenderungan dan memproyeksikan jumlah penduduk dimasa depan.

Dengan menggunakan rumus perhitungan pertumbuhan penduduk sebagai berikut :

$$P_t = P_o \cdot e^{rt}$$

- P_t : Jumlah Penduduk tahun t
 P_o : Jumlah Penduduk pada tahun dasar/ awal (0)
 r : Angka Pertumbuhan Penduduk
 t : Periode waktu antara tahun dasar dan tahun t
 e : Fungsi eksponensial = 2,7182818

Tabel III.2 Angka Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)		PERTUMBUHAN PENDUDUK
		Tahun 2018	Tahun 2019	
1	SUNGAI BEREMAS	27,348	27,491	0.52
2	LEMBAH MELINTANG	49,800	49,959	0.32
3	PASAMAN	75,214	75,970	1.00
4	TALAMAU	30,828	30,599	(0.75)
5	KINALI	70,587	71,121	0.75
6	GUNUNG TULEH	24,424	24,805	1.55
7	RANAH BATAHAN	26,926	27,425	1.84
8	KOTO BALINGKA	30,163	30,716	1.82
9	SUNGAI AUR	35,444	35,830	1.08
10	LUHAK NAN DUO	45,515	44,509	(2.24)
11	SASAK RANAH PESISIR	15,326	15,336	0.07
TOTAL		431,575	433,761	0.51

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester 2 Tahun 2019 Ditjen Duk-Capil Kemendagri, diolah

Angka pertumbuhan penduduk Kabupaten Pasaman Barat selama tahun 2018-2019 sebesar 0,51 persen. Laju pertumbuhan penduduk ini tergolong masih rendah.

b. Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Demografi

1) Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

Karakteristik penduduk menurut umur dan jenis kelamin berguna dalam membantu menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk sesuai dengan kebutuhan kelompok umur masing-masing, baik kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan lain sebagainya.



Setiap kelompok umur memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, misalnya kelompok bayi dan balita, mereka lebih membutuhkan asupan gizi yang baik dan perawatan kesehatan. Bagi penduduk perempuan remaja misalnya, mempunyai kebutuhan untuk meningkatkan status kesehatan agar ketika memasuki usia perkawinan tidak terkena anemia, sedangkan kelompok penduduk usia lanjut juga membutuhkan pelayanan berkaitan dengan kesehatan dan lain-lain. Tabel 3.4 menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Pasaman Barat sebagian besar merupakan penduduk usia produktif yaitu pada kelompok umur antara 15-64 tahun yaitu sebanyak 67,32% dengan komposisi terbesar berada pada penduduk berumur 15-19 tahun, sisanya sebanyak 28,70% merupakan penduduk usia muda (berusia dibawah 15 tahun) dan 3,98% merupakan penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas).

Penduduk berusia kurang dari 15 tahun berjumlah cukup besar yaitu lebih dari seperempat penduduk Kabupaten Pasaman Barat (28,70%). Hal ini harus menjadi perhatian karena 5 tahun mendatang kelompok ini akan menjadi entry tenaga kerja baru, yang memerlukan skill dan kualitas SDM yang memadai baik keterampilan maupun etos kerja dan kepribadian. Untuk memperoleh hal tersebut, diperlukan asupan gizi yang cukup, pendidikan yang memadai serta lingkungan pergaulan yang kondusif, baik di rumah maupun di masyarakat. Sehingga ketika mereka memasuki pasar kerja, mampu memperoleh peluang kerja yang tersedia. Disisi yang lain pemerintah Kabupaten Pasaman Barat harus mampu pula menciptakan pasar kerja yang dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi.

Tabel III.3 Jumlah dan Proporsi Penduduk Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

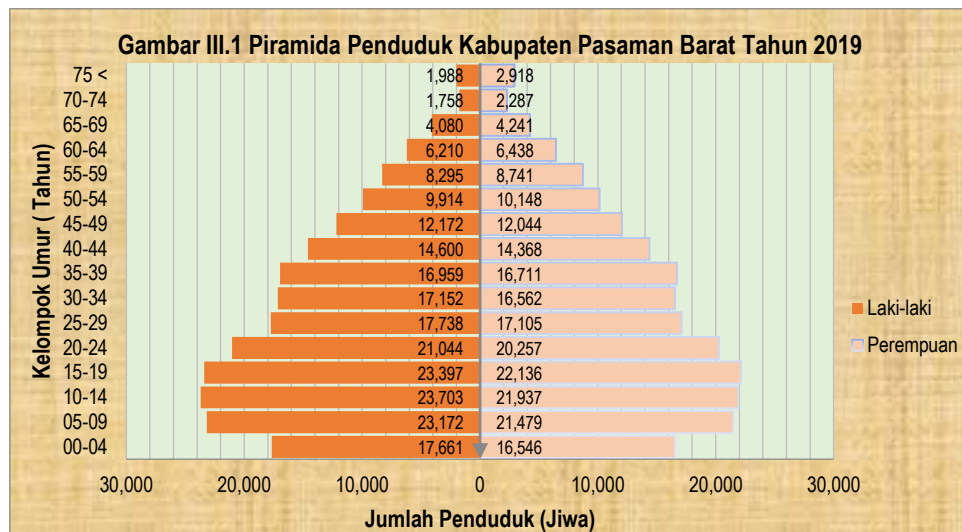
NO	KELOMPOK UMUR	JENIS KELAMIN				PENDUDUK	
		LAKI-LAKI		PEREMPUAN			
		n(JIWA)	(%)	n(JIWA)	(%)	n(JIWA)	(%)
1	00-04	17,661	8.03	16,546	7.73	34,207	7.89
2	05-09	23,172	10.54	21,479	10.04	44,651	10.29
3	10-14	23,703	10.78	21,937	10.25	45,640	10.52
4	15-19	23,397	10.64	22,136	10.35	45,533	10.50
5	20-24	21,044	9.57	20,257	9.47	41,301	9.52
6	25-29	17,738	8.07	17,105	8.00	34,843	8.03
7	30-34	17,152	7.80	16,562	7.74	33,714	7.77
8	35-39	16,959	7.71	16,711	7.81	33,670	7.76
9	40-44	14,600	6.64	14,368	6.72	28,968	6.68
10	45-49	12,172	5.54	12,044	5.63	24,216	5.58

11	50-54	9,914	4.51	10,148	4.74	20,062	4.63
12	55-59	8,295	3.77	8,741	4.09	17,036	3.93
13	60-64	6,210	2.82	6,438	3.01	12,648	2.92
14	65-69	4,080	1.86	4,241	1.98	8,321	1.92
15	70-74	1,758	0.80	2,287	1.07	4,045	0.93
16	75+	1,988	0.90	2,918	1.36	4,906	1.13
JUMLAH		219,843	100	213,918	100	433,761	100

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester 2 Tahun 2019 Ditjen Duk-Capil Kemendagri, diolah

Jika dicermati lebih lanjut, ternyata 7,89% penduduk Kabupaten Pasaman Barat merupakan balita. Kondisi ini menuntut perhatian Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam penanganan penduduk balita terutama dari segi kesehatan dan investasi bidang pendidikan.

Struktur umur penduduk menurut jenis kelamin dapat digambarkan dalam bentuk piramida penduduk. Dasar piramida penduduk menunjukkan jumlah penduduk, dan badan piramida penduduk bagian kiri dan kanan menunjukkan banyaknya penduduk laki-laki dan perempuan menurut kelompok umur lima tahunan. Kabupaten Pasaman Barat menunjukkan struktur penduduk konstriktif (*constrictive*), dengan struktur penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan kelompok umur di atasnya. Pada piramida ini terlihat bahwa jumlah penduduk kelompok umur 00-04 tahun yang terletak pada dasar piramida mulai mengecil. Ini berarti angka kelahiran mulai menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya, walaupun dari segi jumlah absolut tidak kecil. Demikian juga dengan jumlah penduduk 05-09 tahun masih terlihat lebar, berarti lima tahun ke depan dibutuhkan fasilitas pendidikan dasar dan menengah yang cukup untuk menampung penduduk kelompok ini.



Pada piramida penduduk dapat dilihat bahwa jumlah penduduk pada kelompok umur 10-19 tahun menunjukkan jumlah yang besar. Data ini harus menjadi perhatian khusus bagi Kabupaten Pasaman Barat karena usia 10-19 tahun merupakan usia remaja dimana kualitas penduduk dengan rentang usia tersebut sangat menentukan bagi masa depan suatu daerah kedepannya. Penduduk lansia (65 tahun ke atas), menunjukkan proporsi yang masih kecil yaitu 3,98 persen. Namun dimasa depan proporsi penduduk lansia akan terus merambat naik, karena pergeseran umur penduduk serta usia harapan hidup yang semakin meningkat. Pertambahan jumlah penduduk lansia ini harus mulai diantisipasi dari sekarang, karena kelompok ini akan terus membesar di masa depan, sehingga diperlukan kebijakan seperti ketenagakerjaan, kesehatan, pelayanan lansia serta kebutuhan sosial dasar lainnya.

2) Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*)

Rasio Jenis Kelamin (*sex ratio*) adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan banyaknya jumlah penduduk laki-laki dan banyaknya jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam banyaknya jumlah penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Data rasio jenis kelamin ini berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil.

Selain itu, informasi rasio jenis kelamin juga penting diketahui oleh para politisi, terutama untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen. Dengan menggunakan rumus hitung rasio jenis kelamin sebagai berikut :

$$RJK = \frac{\sum L}{\sum P} \times K$$

- RJK = Rasio Jenis Kelamin
 $\sum L$ = Jumlah Penduduk Laki-laki
 $\sum P$ = Jumlah Penduduk Perempuan
 K = Konstanta = 100 penduduk perempuan

Maka gambaran penduduk Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan rasio jenis kelamin tersebut adalah sebagaimana terlihat pada tabel 5 berikut :

**Tabel III.4 Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio)
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019**

NO	KELOMPOK UMUR (Tahun)	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH PENDUDUK	RASIO JENIS KELAMIN
1	00-04	17,661	16,546	34,207	106.74
2	05-09	23,172	21,479	44,651	107.88
3	10-14	23,703	21,937	45,640	108.05
4	15-19	23,397	22,136	45,533	105.70
5	20-24	21,044	20,257	41,301	103.89
6	25-29	17,738	17,105	34,843	103.70
7	30-34	17,152	16,562	33,714	103.56
8	35-39	16,959	16,711	33,670	101.48
9	40-44	14,600	14,368	28,968	101.61
10	45-49	12,172	12,044	24,216	101.06
11	50-54	9,914	10,148	20,062	97.69
12	55-59	8,295	8,741	17,036	94.90
13	60-64	6,210	6,438	12,648	96.46
14	65-69	4,080	4,241	8,321	96.20
15	70-74	1,758	2,287	4,045	76.87
16	75+	1,988	2,918	4,906	68.13
J U M L A H		219,843	213,918	433,761	102.77

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester 2 Tahun 2019 Ditjen Duk-Capil Kemendagri, diolah

Dari tabel III.4 nampak bahwa Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) di Kabupaten Pasaman Barat adalah 102,77 yang berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 102-103 orang penduduk laki-laki. Dari data mengenai gambaran rasio jenis kelamin Kabupaten Pasaman Barat tersebut, terdapat suatu keunikan dimana datanya berbeda dengan gambaran rasio jenis kelamin secara nasional dimana lebih banyak penduduk perempuan dibanding penduduk laki-laki, sedangkan di Kabupaten Pasaman Barat lebih banyak penduduk laki-laki dibanding penduduk perempuan. Namun demikian, jika dilihat



dari kelompok umur menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki yang lebih besar berada pada kelompok umur 00-14 tahun. Sedangkan jika dilihat pada kelompok umur 0-4 tahun sebesar 106,74 yang artinya terdapat 106-107 balita berjenis kelamin laki-laki dari 100 balita perempuan. Secara biologis jumlah kelahiran bayi laki-laki pada umumnya lebih besar dibanding dengan kelahiran bayi perempuan, namun bayi laki-laki lebih rentan terhadap kematian dibanding bayi perempuan. Rasio jenis kelamin pada kelompok umur diatas 50 tahun menunjukkan penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Ini menunjukkan bahwa teori yang mengatakan bahwa umur harapan hidup perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki adalah benar, karena secara biologis umur harapan hidup perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki

3) Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*)

Rasio Ketergantungan (*Dependency ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Rasio Ketergantungan digunakan untuk melihat hubungan antara perubahan struktur umur penduduk dengan ekonomi secara kasar. Rasio ini melihat seberapa besar beban tanggungan yang harus dipikul oleh penduduk produktif terhadap penduduk yang tidak produktif.

Penduduk produktif secara ekonomi adalah mereka yang berada pada umur 15–64 tahun, yang dianggap memiliki potensi ekonomi atau penduduk yang berpotensi sebagai modal pembangunan. Sedangkan penduduk yang belum produktif (0-14 tahun) dan penduduk yang dianggap kurang produktif atau tidak produktif lagi (65 tahun ke atas). Semakin tingginya persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi dan semakin rendah rasio ketergantungan, maka semakin rendah pula beban kelompok umur produktif untuk menanggung penduduk usia tidak produktif atau belum produktif.

Rasio ketergantungan dapat dilihat menurut usia yakni Rasio Ketergantungan Muda dan Rasio Ketergantungan Tua.

- **Rasio Ketergantungan Muda** adalah : perbandingan jumlah penduduk umur 0-14 tahun dengan jumlah penduduk umur 15 – 64 tahun.

- **Rasio Ketergantungan Tua** adalah : perbandingan jumlah penduduk umur 65 tahun ke atas dengan jumlah penduduk di usia 15-64 tahun

Untuk menghitung Rasio Ketergantungan didapat dengan membagi total dari jumlah penduduk usia belum produktif (0-14 tahun) dan jumlah penduduk usia tidak produktif (65 tahun keatas) dengan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) dengan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 RK_{\text{muda}} &= \frac{P_{0-14}}{P_{15-64}} \times 100 \\
 RK_{\text{tua}} &= \frac{P_{65+}}{P_{15-64}} \times 100 \\
 RK_{\text{total}} &= \frac{(P_{0-14}) + (P_{65+})}{P_{15-64}} \times 100
 \end{aligned}$$

RK_{Total} = Rasio Ketergantungan Penduduk Usia Muda dan Tua

RK_{Muda} = Rasio Ketergantungan Penduduk Usia Muda

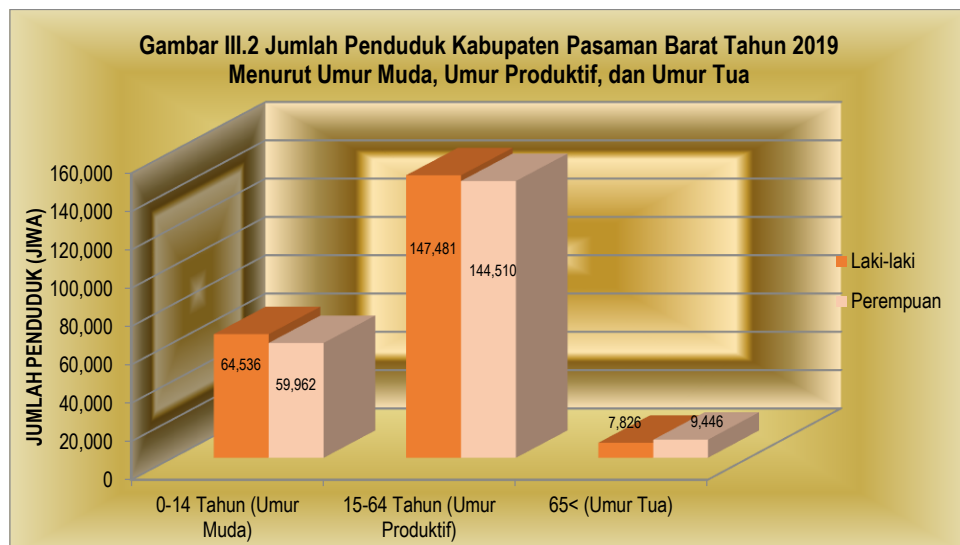
RK_{Tua} = Rasio Ketergantungan Penduduk Usia Tua

$P_{(0-14)}$ = Jumlah Penduduk Usia Muda (0-14 tahun)

$P_{(65+)}$ = Jumlah Penduduk Usia Tua (65 tahun keatas)

$P_{(15-64)}$ = Jumlah Penduduk Usia Produktif (15 -65 tahun)

Jumlah penduduk menurut umur muda, umur produktif dan umur tua juga dapat ditampilkan dalam grafik berikut :





**Tabel III.5 Jumlah Penduduk Kabupaten Pasaman Barat
Menurut Umur Muda, Umur Produktif dan Umur Tua Tahun 2019**

NO.	KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH PENDUDUK
1	0-14 Tahun (Umur Muda)	64,536	59,962	124,498
2	15-64 Tahun (Umur Produktif)	147,481	144,510	291,991
3	65< (Umur Tua)	7,826	9,446	17,272
JUMLAH		219,843	213,918	433,761

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester 2 Tahun 2019 Ditjen Duk-Capil Kemendagri, diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat dihitung rasio ketergantungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} RK_{\text{muda}} &= (124.498 / 291.911) \times 100 \\ &= 42,64 \% \\ RK_{\text{tua}} &= (17.272 / 291.911) \times 100 \\ &= 5,92 \% \\ RK_{\text{total}} &= ((124.498 + 17.272) / 291.911) \times 100 \\ &= 48,55 \% \end{aligned}$$

Dari perhitungan diatas, didapat rasio ketergantungan total adalah sebesar 48,55 persen, artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 48-49 orang (48,55%) yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Rasio sebesar 48,55 persen ini disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk muda sebesar 42,64 persen dan rasio ketergantungan penduduk tua sebesar 5,92 persen. Dari indikator ini terlihat bahwa pada tahun 2019 penduduk usia kerja di Kabupaten Pasaman Barat masih dibebani tanggung jawab akan penduduk muda yang proporsinya lebih banyak dibandingkan tanggung jawab terhadap penduduk tua.

Angka ini masih termasuk tinggi dimana ketergantungan penduduk usia muda masih besar. Dengan karakteristik penduduk muda, maka tidak terhindarkan bahwa pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menghadapi beban besar dalam investasi sosial. Investasi sosial adalah kegiatan antara lain pengembangan sumber daya manusia dan untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar bagi anak-anak dibawah 15 tahun. Karena bagaimanapun juga ditangan merekalah nantinya akan dilanjutkan tongkat estafet keberlanjutan pembangunan di masa

yang akan datang. Disamping itu, menjadi tantangan bagi pemerintah Kabupaten Pasaman Barat untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kualitas penduduk.

c. Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Sosial

1) Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan salah satu ukuran untuk kualitas penduduk. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan semakin baik kualitas SDM di wilayah tersebut. Namun ukuran ini masih harus ditambah dengan etos kerja dan ketrampilan baik *hard skill* maupun *soft skill*. Beberapa pelaku usaha menyatakan bahwa yang dibutuhkan tidak saja ketrampilan tetapi juga kepribadian, karena ketrampilan bisa ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan.

Tamat sekolah didefinisikan sebagai jenjang pendidikan yang telah berhasil diselesaikan oleh seseorang dengan dibuktikan adanya ijazah atau surat tanda tamat belajar. Tetapi jika menggunakan ukuran menurut jenjang tertinggi merupakan jenjang atau kelas tertinggi yang pernah ditempuh oleh seseorang.

Jumlah dan Proporsi penduduk Kabupaten Pasaman Barat menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan ditunjukkan pada Tabel III.6. Dari sana terlihat bahwa kualitas penduduk Kabupaten Pasaman Barat menurut tingkat pendidikan formalnya sampai dengan tahun 2019 relatif rendah.

Lebih dari separuh penduduk Kabupaten Pasaman Barat yang berusia diatas 7 Tahun (56,78%) tidak/belum sekolah, tidak/belum tamat SD atau hanya tamat SD. Persentase penduduk usia diatas 7 tahun yang tidak bersekolah lebih tinggi pada penduduk laki-laki dibandingkan dengan penduduk perempuan. Dan pada tingkat pendidikan belum tamat SD dan tamat SD, persentase penduduk laki-laki berusia diatas 7 tahun masih lebih besar dari pada penduduk perempuan.

Tabel III.6. Jumlah Penduduk Kabupaten Pasaman Barat berusia ≥ 7 Tahun Tahun 2019 Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		n	%	n	%	n	%
1	Tidak/Belum Sekolah	29,410	15.06	27,957	14.63	57,367	14.85
2	Tidak/Belum Tamat SD	32,992	16.89	30,478	15.95	63,470	16.43
3	Tamat SD/Sederajat	49,383	25.29	49,129	25.71	98,512	25.5
4	SLTP /Sederajat	35,623	18.24	34,498	18.05	70,121	18.15
5	SLTA/Sederajat	39,730	20.34	35,622	18.64	75,352	19.5
6	Diploma I/II	811	0.42	2,129	1.11	2,940	0.76



7	Diploma III/SM	1,392	0.71	3,061	1.6	4,453	1.15
8	Diploma IV/ S-1	5,692	2.91	8,029	4.2	13,721	3.55
9	Strata-II	254	0.13	183	0.1	437	0.11
10	Strata-III	7	0	1	0	8	0
JUMLAH		195,294	100	191,087	100	386,381	100

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester 2 tahun 2019 Ditjen Duk-Capil Kemendagri, diolah

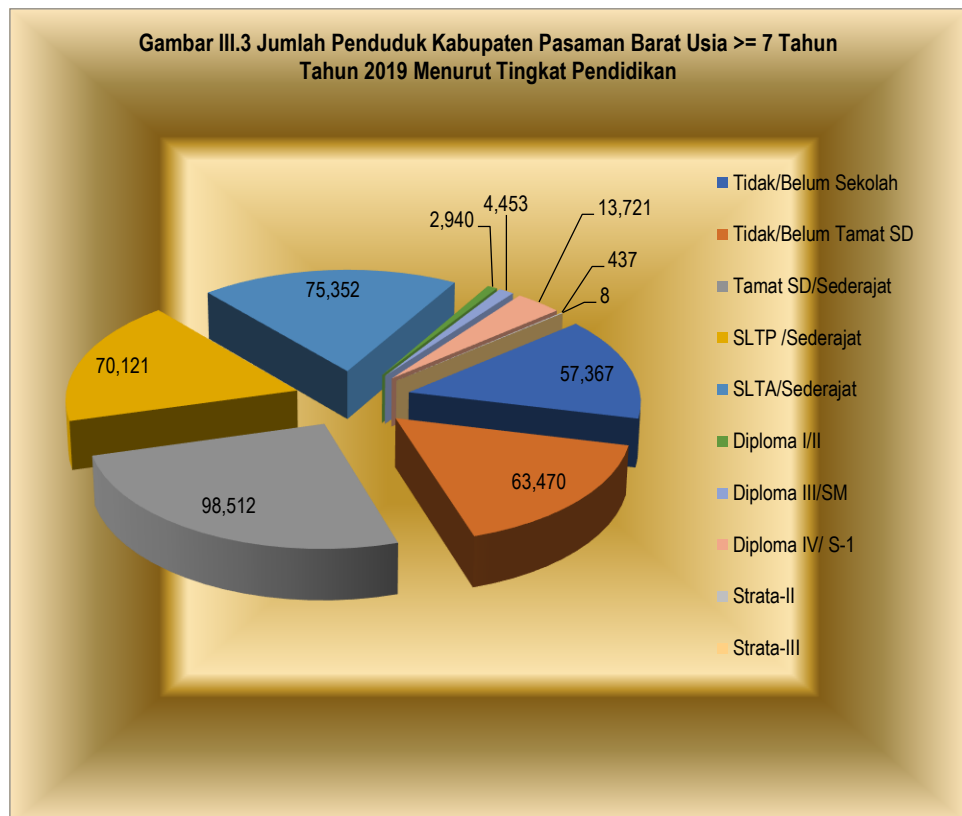
Jika dilihat menurut jenis kelamin, persentase penduduk berusia diatas 7 tahun yang tamat SD untuk penduduk Laki-laki sedikit lebih besar dibandingkan dengan penduduk Perempuan. Hal ini juga pada jenjang pendidikan SLTP, persentase penduduk laki-laki yang tamat SLTP lebih besar dari penduduk perempuan.

Pada jenjang pendidikan SLTA, persentase penduduk yang tamat SLTA untuk penduduk perempuan lebih rendah daripada penduduk laki-laki. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, maka semakin sedikit perempuan yang berhasil menamatkan pendidikannya. Hal ini sama dengan gambaran pendidikan nasional, dimana angka melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi untuk perempuan lebih rendah dibanding laki-laki.

Berkaitan dengan rendahnya persentase penduduk yang telah menyelesaikan pendidikan dasar, untuk itu pemerintah Kabupaten Pasaman Barat perlu memperhatikan penduduk usia sekolah yang tidak/belum bersekolah. Sebagaimana pasal 11 UU Nomor 20 tahun 2003 yaitu Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi dan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat perlu memperhatikan kondisi tersebut mengingat bahwa era globalisasi sedang berlangsung dan persaingan semakin ketat dan berat. Oleh karena itu, akses ke pendidikan terutama untuk penduduk miskin, perlu dilakukan mengingat bahwa sebagian besar peluang kerja membutuhkan tenaga terdidik yang memiliki ketrampilan khusus. Jumlah penduduk berusia diatas 7 tahun menurut tingkat pendidikan juga dapat dilihat pada Gambar III.3 berikut :

Gambar III.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Pasaman Barat Usia >= 7 Tahun Tahun 2019 Menurut Tingkat Pendidikan



2) Komposisi Penduduk Menurut Agama

Informasi tentang jumlah penduduk berdasarkan agama diperlukan untuk merencanakan penyediaan sarana dan prasarana peribadatan serta merencanakan suatu program kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama.

Tabel III.7 Jumlah Penduduk Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Menurut Agama dan Kecamatan

NO	KECAMATAN	PENDU DUK	A G A M A									
			Islam		Kristen		Katholik		Budha		Kepercayaan	
			(Jiwa)	(%)	(Jiwa)	(%)	(Jiwa)	(%)	(Jiwa)	(%)	(Jiwa)	(%)
1	SUNGAI BEREMAS	27,491	27,107	6.25	351	0.08	33	0.01	0	0	0	0
2	LEMBAH MELINTANG	49,959	49,911	11.51	48	0.01	0	0	0	0	0	0
3	PASAMAN	75,970	74,558	17.19	1,237	0.29	150	0.03	4	0	21	0
4	TALAMAU	30,599	30,596	7.05	3	0	0	0	0	0	0	0
5	KINALI	71,121	69,023	15.91	1,377	0.32	717	0.17	0	0	4	0
6	GUNUNG TULEH	24,805	24,769	5.71	35	0.01	1	0	0	0	0	0
7	RANAH BATAHAN	27,425	27,406	6.32	19	0	0	0	0	0	0	0
8	KOTO BALINGKA	30,716	30,435	7.02	247	0.06	34	0.01	0	0	0	0
9	SUNGAI AUR	35,830	33,938	7.82	1,732	0.4	159	0.04	1	0	0	0
10	LUHAK NAN DUO	44,509	41,339	9.53	1,548	0.36	1,620	0.37	2	0	0	0
11	SASAK RANAH PESISIR	15,336	15,031	3.47	302	0.07	3	0	0	0	0	0
KABUPATEN PASAMAN BARAT		433,761	424,113	97.78	6,899	1.59	2,717	0.63	7	0	25	0.01

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester 2 Tahun 2019 Ditjen Duk-Capil Kemendagri, diolah



Jika dikaitkan dengan wilayah kecamatan, maka Agama Islam mendominasi semua wilayah kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat. Dari keseluruhan kecamatan, Agama Islam paling banyak dianut penduduk yaitu sebanyak 97,78% disusul kemudian pemeluk agama Kristen sebanyak 1,59%, dan Katholik sebanyak 0,63%.

3) Komposisi Penduduk Menurut Status Perkawinan

Informasi tentang struktur perkawinan penduduk pada waktu tertentu berguna bagi para penentu kebijakan dan pelaksana program kependudukan. Terutama dalam hal pembangunan keluarga, kelahiran dan upaya-upaya peningkatan kualitas keluarga. Dari informasi penduduk berstatus kawin, Umur Perkawinan Pertama, lama kawin akan berguna untuk mengestimasi angka kelahiran yang akan terjadi.

Umur perkawinan pertama misalnya berkaitan dengan lamanya seseorang perempuan beresiko untuk hamil dan melahirkan. Perkawinan umur dini juga akan berakibat pada besarnya angka perceraian, ketidaksiapan orang tua untuk pengasuhan anak serta kurang matangnya perempuan menjalankan tugas dan fungsinya dalam rumah tangga.

Tabel III.8 Jumlah dan Proporsi Penduduk Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Menurut Kecamatan dan Status Perkawinan

NO	KECAMATAN	STATUS PERKAWINAN								PDDK
		BELUM KAWIN		KAWIN		CERAI HIDUP		CERAI MATI		
		(Jiwa)	(%)	(Jiwa)	(%)	(Jiwa)	(%)	(Jiwa)	(%)	(Jiwa)
1	SUNGAI BEREMAS	15,339	6.73	10,973	5.96	207	4.65	792	5.16	27,311
2	LEMBAH MELINTANG	28,337	12.44	19,011	10.33	517	11.62	1,875	12.22	49,740
3	PASAMAN	38,245	16.79	33,962	18.45	999	22.44	2,425	15.81	75,631
4	TALAMAU	15,633	6.86	13,034	7.08	324	7.28	1,451	9.46	30,442
5	KINALI	36,072	15.84	32,038	17.40	602	13.53	2,021	13.17	70,733
6	GUNUNG TULEH	13,161	5.78	10,173	5.53	274	6.16	1,122	7.31	24,730
7	RANAH BATAHAN	14,461	6.35	11,469	6.23	277	6.22	1,099	7.16	27,306
8	KOTO BALINGKA	16,834	7.39	12,307	6.69	297	6.67	1,182	7.70	30,620
9	SUNGAI AUR	19,682	8.64	14,339	7.79	359	8.07	1,253	8.17	35,633
10	LUHAK NAN DUO	22,237	9.76	19,952	10.84	450	10.11	1,600	10.43	44,239
11	SASAK RANAH PESISIR	7,752	3.40	6,837	3.71	145	3.26	523	3.41	15,257
KAB. PASAMAN BARAT		227,753	100	184,095	100	4,451	100	15,343	100	431,642

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester 2 Tahun 2018, Ditjen Duk-Capil Kemendagri, diolah

Tabel III.8. menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Pasaman Barat didominasi oleh penduduk berstatus belum kawin yakni 227,753 jiwa. Sementara penduduk berstatus kawin sebanyak 184,095 jiwa dan berstatus cerai hidup 4,451 jiwa lebih kecil dibandingkan angka cerai mati yang mencapai 15,343 jiwa

Tabel III.9 Jumlah Penduduk Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Menurut Kelompok Umur dan Status Perkawinan

NO	KELOMPOK UMUR	Belum Kawin		Kawin		Cerai Hidup		Cerai Mati		Jumlah	
		n (Jiwa)	%	n (Jiwa)	%	n (Jiwa)	%	n (Jiwa)	%	n (Jiwa)	%
1	00-04	26,668	6.15	0	0.00	0	0.00	0	0.00	26,668	6.15
2	05-09	44,016	10.15	0	0.00	0	0.00	0	0.00	44,016	10.15
3	10-14	45,622	10.52	0	0.00	0	0.00	0	0.00	45,622	10.52
4	15-19	45,199	10.42	231	0.05	0	0.00	0	0.00	45,430	10.47
5	20-24	36,861	8.50	5,326	1.23	37	0.01	14	0.00	42,238	9.74
6	25-29	18,754	4.32	17,011	3.92	186	0.04	55	0.01	36,006	8.30
7	30-34	6,773	1.56	26,303	6.06	362	0.08	165	0.04	33,603	7.75
8	35-39	2,884	0.66	29,735	6.86	555	0.13	338	0.08	33,512	7.73
9	40-44	1,206	0.28	27,689	6.38	570	0.13	577	0.13	30,042	6.93
10	45-49	601	0.14	22,990	5.30	614	0.14	992	0.23	25,197	5.81
11	50-54	266	0.06	18,497	4.26	581	0.13	1,525	0.35	20,869	4.81
12	55-59	136	0.03	14,369	3.31	518	0.12	2,061	0.48	17,084	3.94
13	60-64	109	0.03	11,015	2.54	498	0.11	2,554	0.59	14,176	3.27
14	65-69	53	0.01	6,175	1.42	285	0.07	2,383	0.55	8,896	2.05
15	70-74	32	0.01	2,735	0.63	124	0.03	1,709	0.39	4,600	1.06
16	> 75	46	0.01	2,607	0.60	155	0.04	2,994	0.69	5,802	1.34
TOTAL		229,226	52.85	184,683	42.58	4,485	1.03	15,367	3.54	433,761	100

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester 2 Tahun 2019, Ditjen Duk-Capil Kemendagri, diolah

Jika dikaitkan dengan kelompok umur, pada tabel III.9. terlihat bahwa proporsi tertinggi penduduk yang berstatus belum kawin berada pada kelompok umur 10-14 tahun, sedangkan yang berstatus kawin proporsi tertinggi berada pada kelompok umur 35-39 tahun. Banyaknya proporsi penduduk muda yang belum kawin diduga disebabkan oleh besarnya jumlah penduduk yang berada pada umur sekolah ditambah dengan mereka yang berstatus bekerja. Proporsi penduduk yang berstatus cerai hidup lebih banyak berada pada kelompok umur 45-49 tahun, sedangkan penduduk berstatus cerai mati lebih banyak berada pada kelompok umur >75 tahun.

Tabel III.9. juga menunjukkan adanya penduduk usia muda (15-19 Tahun) yang sudah berstatus kawin yang jumlahnya 231 orang. Sedangkan pada kelompok umur 20-24 tahun penduduk yang berstatus kawin sebanyak 5.326,



cerai hidup 37 orang, dan cerai mati 14 orang. Kondisi ini memerlukan perhatian pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang berkaitan masalah kehamilan, persalinan dan paska melahirkan (kesehatan reproduksi) dan pelayanan KB.

a) Angka Perkawinan Kasar

Angka perkawinan kasar menunjukkan banyaknya perkawinan pada suatu periode tertentu per 1.000 penduduk pada pertengahan periode yang sama di suatu wilayah. Angka perkawinan kasar ini berguna untuk memberikan pelayanan-pelayanan yang berkaitan dengan perkawinan.

Angka perkawinan kasar di Kabupaten Pasaman Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel III.10. Angka Perkawinan Kasar
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Menurut Kecamatan**

NO	KECAMATAN	Jumlah Perkawinan	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Des 2019 + Des 2018/2)	Angka Perkawinan Kasar
1	SUNGAI BEREMAS	210	27,420	7.66
2	LEMBAH MELINTANG	438	49,880	8.78
3	PASAMAN	557	75,592	7.37
4	TALAMAU	277	30,714	9.02
5	KINALI	584	70,854	8.24
6	GUNUNG TULEH	195	24,615	7.92
7	RANAH BATAHAN	237	27,176	8.72
8	KOTO BALINGKA	234	30,440	7.69
9	SUNGAI AUR	240	35,637	6.73
10	LUHAK NAN DUO	364	45,012	8.09
11	SASAK RANAH PESISIR	117	15,331	7.63
TOTAL		3,453	432,668	7.98

Sumber : - Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2019 Ditjen Duk-Capil Kemendagri, diolah
a. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman Barat

b) Angka Perkawinan Umum

Angka perkawinan umum menunjukkan banyaknya perkawinan pada suatu periode tertentu per 1.000 penduduk berusia di atas 15 tahun pada pertengahan periode yang sama di suatu wilayah. Angka perkawinan umum merupakan indikator yang lebih cermat dibandingkan dengan angka perkawinan kasar karena dalam perhitungannya hanya memasukan penduduk yang beresiko kawin saja yaitu yang berumur 15 tahun ke atas sebagai faktor penyebut.

**Tabel III.11 Angka Perkawinan Umum Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019
Menurut Kecamatan**

NO	KECAMATAN	Jumlah Perkawinan	Jumlah Penduduk Usia ≥ 15 Tahun Pada Pertengahan Tahun (≥ 15 Des 2019 + ≥ 15 Des 2018/2)	Angka Perkawinan Umum
1	SUNGAI BEREMAS	210	19,283	10.89
2	LEMBAH MELINTANG	438	34,946	12.53
3	PASAMAN	557	53,964	10.32
4	TALAMAU	277	22,788	12.16
5	KINALI	584	50,479	11.57
6	GUNUNG TULEH	195	17,633	11.06
7	RANAH BATAHAN	237	19,661	12.05
8	KOTO BALINGKA	234	21,460	10.90
9	SUNGAI AUR	240	25,087	9.57
10	LUHAK NAN DUO	364	32,677	11.14
11	SASAK RANAH PESISIR	117	11,217	10.43
TOTAL		3,453	309,192	11.17

Sumber : - Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2019 Ditjen Duk-Capil Kemendagri, diolah
a. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman Barat

Tabel III.11 memperlihatkan bahwa angka perkawinan umum di Kabupaten Pasaman Barat sebesar 11,17 yang berarti dari 1.000 penduduk berumur 15 tahun ke atas di Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2019 terjadi kurang lebih 11 - 12 perkawinan. Angka perkawinan umum tertinggi terjadi di Kecamatan Lembah Melintang sebesar 12,53 yang berarti dari 1.000 penduduk 15 tahun ke atas di Kecamatan Lembah Melintang pada Tahun 2019 terjadi 12 sampai 13 perkawinan dan angka perkawinan umum terendah terjadi di Kecamatan Sungai Aur.

d. Keluarga

Informasi tentang jumlah keluarga dan komposisi anggota keluarga, diperlukan dalam perencanaan maupun implementasi kebijakan pemenuhan pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, kebutuhan pangan, pengentasan kemiskinan dan sebagainya.

a. Penduduk Menurut Status Hubungan Dalam keluarga

Status hubungan anggota keluarga dengan kepala keluarga diperlukan untuk melihat komposisi anggota keluarga, pola pengaturan tempat tinggal (*living arrangement*) dan pola pengasuhan anak.



**Tabel III.12 Jumlah Penduduk Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019
Menurut Jenis Kelamin dan Status Hubungan Dalam Keluarga**

NO	Status Hubungan Dalam Keluarga	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
		n (Jiwa)	%	n (Jiwa)	%	n (Jiwa)	%
1	Kepala Keluarga	94,956	43.19	17,481	8.17	112,437	25.92
2	Suami	4	0.00	0	0.00	4	0.00
3	Istri	0	0.00	90,385	42.25	90,385	20.84
4	Anak	121,876	55.44	102,362	47.85	224,238	51.70
5	Menantu	7	0.00	9	0.00	16	0.00
6	Cucu	631	0.29	565	0.26	1,196	0.28
7	Orang Tua	111	0.05	782	0.37	893	0.21
8	Mertua	136	0.06	907	0.42	1,043	0.24
9	Famili Lain	2,090	0.95	1,379	0.64	3,469	0.80
10	Pembantu	4	0.00	3	0.00	7	0.00
11	Lainnya	28	0.01	45	0.02	73	0.02
TOTAL		219,843	100	213,918	100	433,761	100

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester 2 Tahun 2019 Ditjen Duk-Capil Kemendagri, diolah.

Pada tabel III.12 terlihat bahwa Kepala Keluarga laki-laki umumnya mempunyai pasangan/istri, yakni dari total 94.956 Kepala Keluarga laki-laki memiliki pasangan hidup (isteri) sebanyak 90.385 istri, tetapi dari total 17.481 Kepala Keluarga perempuan hanya 4 dari penduduk tersebut yang bersuami. Ini menunjukkan banyaknya kepala keluarga perempuan yang tidak memiliki suami, bisa saja pasangan hidupnya sudah meninggal atau bercerai. Perempuan berstatus kepala keluarga ini perlu mendapat perhatian lebih, karena pada umumnya keluarga yang dikepalai oleh kepala keluarga perempuan mempunyai tingkat kesejahteraan lebih rendah dibandingkan keluarga yang dikepalai oleh laki-laki.

Adapun proporsi anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah yang berstatus menantu, cucu, orang tua, mertua, famili lain, pembantu, dan lainnya menunjukkan proporsi yang rendah yaitu sekitar 1.55 persen. Ini mencerminkan bahwa keluarga luas (*extended family*) di Kabupaten Pasaman Barat jumlahnya relatif kecil.

b. Jumlah Keluarga dan Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga

Keluarga dibentuk dari sekelompok orang yang terikat dan mempunyai hubungan kekerabatan karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya. Unit keluarga menjadi hal penting untuk berbagai intervensi seperti penanganan kemiskinan, keluarga berencana, kesehatan dan lain sebagainya. Keluarga terbagi

menjadi dua yaitu keluarga inti/batih (*nuclear family*) dan keluarga luas (*extended family*). Besarnya jumlah anggota keluarga biasanya digunakan untuk menggambarkan kesejahteraan keluarga, dimana semakin kecil jumlah anggota keluarga diasumsikan akan semakin tinggi tingkat kesejahteraannya.

Pada saat sekarang ini sudah mulai muncul adanya keluarga yang terdiri dari 3 generasi yaitu generasi orang tua, anak dan menantu dan cucu atau yang biasa disebut dengan *sandwiches family*, dimana pasangan suami istri harus menanggung orang tua/mertua dan anak-anak mereka sendiri. Persoalan yang muncul adalah bagaimana dengan kesejahteraan mereka, bagaimana dengan beban yang mereka tanggung dan bagaimana sistem pengasuhan baik orang tua maupun anak bisa berlangsung dalam keluarga semacam ini.

Jumlah kepala keluarga di Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 112.437 keluarga yang tersebar di 11 (sebelas) kecamatan. Kecamatan Pasaman memiliki jumlah keluarga terbesar yaitu 20.244 keluarga, kemudian disusul oleh kecamatan Kinali sebanyak 18.551 keluarga dan Kecamatan Luhak Nan Duo sebanyak 12.062 keluarga

Dari tabel III.20. terlihat bahwa rata-rata jumlah anggota keluarga di Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 3,86 perkeluarga. Ini menunjukkan bahwa keluarga di Kabupaten Pasaman Barat lebih banyak merupakan keluarga inti dengan jumlah anggota keluarga sebanyak 3 sampai 4 orang. Bila diperhatikan menurut kecamatan, rata-rata jumlah anggota keluarga di setiap Kecamatan juga terdiri dari 3 sampai 4 orang per keluarga.

**Tabel III.13 Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019**

No.	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	Jumlah KK/Kepala Keluarga (Jiwa)	Rata-rata Jiwa/KK
1	SUNGAIBEREMAS	27,491	6,656	4.13
2	LEMBAH MELINTANG	49,959	12,028	4.15
3	PASAMAN	75,970	20,244	3.75
4	TALAMAU	30,599	8,136	3.76
5	KINALI	71,121	18,551	3.83
6	GUNUNGTULEH	24,805	6,565	3.78
7	RANAH BATAHAN	27,425	7,365	3.72
8	KOTO BALINGKA	30,716	7,765	3.96
9	SUNGAIAUR	35,830	8,977	3.99
10	LUHAK NAN DUO	44,509	12,062	3.69
11	SASAK RANAH PESISIR	15,336	4,088	3.75
PASAMAN BARAT		433,761	112,437	3.86

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester 2 Tahun 2019, Ditjen Duk-Capil Kemendagri, diolah



Informasi tentang rata-rata jumlah anggota keluarga ini dapat digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan program keluarga berencana di wilayah Kabupaten Pasaman Barat dan dapat digunakan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam merencanakan kebutuhan perumahan, seperti untuk menentukan ukuran rumah dengan berbagai tipe agar dapat memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat yang beranggota 3 sampai 4 orang.

c. Karakteristik Kepala Keluarga

Karakteristik kepala keluarga berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan, status kesehatan, pekerjaan penting untuk diketahui, berkaitan dengan perencanaan kebijakan pelayanan kebutuhan dasar berbasis keluarga seperti ketersediaan pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, kemiskinan, dan lain-lain.

a) Jumlah dan Proporsi Kepala Keluarga Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin

Tabel III.14 Jumlah dan Proporsi Kepala Keluarga Kabupaten Pasaman Barat Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2019

No	Kecamatan	Laki-Laki (Jiwa)		Perempuan (Jiwa)		Total	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	SUNGAI BEREMAS	5,655	5.96	1,001	5.73	6,656	5.92
2	LEMBAH MELINTANG	9,803	10.32	2,225	12.73	12,028	10.70
3	PASAMAN	17,364	18.29	2,880	16.48	20,244	18.00
4	TALAMAU	6,766	7.13	1,370	7.84	8,136	7.24
5	KINALI	16,241	17.10	2,310	13.21	18,551	16.50
6	GUNUNG TULEH	5,318	5.60	1,247	7.13	6,565	5.84
7	RANAH BATAHAN	6,089	6.41	1,276	7.30	7,365	6.55
8	KOTO BALINGKA	6,386	6.73	1,379	7.89	7,765	6.91
9	SUNGAI AUR	7,487	7.88	1,490	8.52	8,977	7.98
10	LUHAK NAN DUO	10,324	10.87	1,738	9.94	12,062	10.73
11	SASAK RANAH PESISIR	3,523	3.71	565	3.23	4,088	3.64
PASAMAN BARAT		94,956	100	17,481	100	112,437	100

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester 2 Tahun 2019 Ditjen Duk-Capil Kemendagri, diolah

Tabel III.13 menyajikan Jumlah dan Proporsi Kepala Keluarga Kabupaten Pasaman Barat tahun 2019 menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin. Dari tabel tersebut terlihat bahwa mayoritas kepala keluarga di Kabupaten Pasaman Barat adalah laki-laki yaitu 94.956 orang sedangkan perempuan yang menjadi kepala keluarga sebanyak 17.481 orang.

Dari tabel III.13. terlihat bahwa masyarakat Indonesia cenderung menganggap bahwa laki-laki adalah penanggung jawab ekonomi keluarga sekaligus sebagai kepala keluarga. Namun dalam kenyataannya tidak sedikit perempuan yang menjadi kepala keluarga karena pasangan meninggal, cerai atau sebab-sebab yang lain.

Karakteristik kepala keluarga menurut jenis kelamin ini dapat menunjukkan seberapa banyak perempuan yang menjadi kepala keluarga, bagaimana kecenderungannya di masa depan dan bagaimana gambaran sosial ekonomi keluarga yang dikepalai oleh seorang perempuan.

Selain itu, penambahan persentase kepala keluarga perempuan tersebut dapat juga menggambarkan tingkat perceraian (baik cerai hidup maupun cerai mati) yang terjadi dan juga dapat menggambarkan salah satu tren gaya hidup modern yakni perempuan yang hidup melajang.

b) Jumlah dan Proporsi Kepala Keluarga Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Jika dilihat menurut kelompok umur, maka tabel III.22. menunjukkan bahwa mayoritas keluarga di Kabupaten Pasaman Barat dikepalai oleh kepala keluarga yang berumur antara 30-44 tahun. Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pasaman Barat merupakan keluarga yang berada pada kelompok produktif.

Tabel III.15 Jumlah dan Proporsi Kepala Keluarga Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

No	Kelompok Umur	Laki-Laki (Jiwa)		Perempuan (Jiwa)		Total	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	15-19	74	0.08	24	0.14	98	0.09
2	20-24	2,007	2.11	218	1.25	2,225	1.98
3	25-29	7,462	7.86	411	2.35	7,873	7.00
4	30-34	12,960	13.65	695	3.98	13,655	12.14
5	35-39	15,109	15.91	1,019	5.83	16,128	14.34
6	40-44	13,904	14.64	1,274	7.29	15,178	13.50
7	45-49	11,852	12.48	1,618	9.26	13,470	11.98
8	50-54	9,769	10.29	2,164	12.38	11,933	10.61
9	55-59	8,171	8.61	2,501	14.31	10,672	9.49
10	60-64	6,134	6.46	2,492	14.26	8,626	7.67
11	65-69	3,997	4.21	2,136	12.22	6,133	5.45
12	70-74	1,691	1.78	1,273	7.28	2,964	2.64
13	> 75	1,826	1.92	1,656	9.47	3,482	3.10
PASAMAN BARAT		94,956	100	17,481	100	112,437	100

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2019 Ditjen Duk-Capil Kemendagri, diolah



Dan apabila dikaitkan dengan jenis kelamin, tabel III.14. juga menunjukkan bahwa mayoritas Kepala Keluarga laki-laki berada di kelompok umur 35-39 tahun, sedangkan proporsi Kepala Keluarga perempuan tertinggi berada di kelompok umur 55-59 tahun. Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pasaman Barat merupakan keluarga yang berada pada kelompok produktif.

Dan juga menarik untuk diperhatikan adalah Kepala Keluarga berumur 75 tahun keatas yaitu sebesar 3,10 persen, hal ini diasumsikan adanya peningkatan umur harapan hidup penduduk di Kabupaten Pasaman Barat.

c) Jumlah dan Proporsi Kepala Keluarga Menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin

Pada umumnya kepala keluarga di Kabupaten Pasaman Barat berstatus kawin (83,02%). Disamping itu, terlihat pula pada tabel III.23. adanya kepala keluarga yang berstatus belum kawin (lajang) sebanyak 1,38 persen. Namun hal ini perlu dikaji kembali apakah mereka yang berstatus lajang ini memiliki anggota keluarga atau hanya hidup sendirian. Biasanya kepala keluarga yang berstatus belum kawin merupakan anggota keluarga yang menggantikan orang tua yang meninggal, atau kepala keluarga tersebut hidup sendirian.

Tabel III.16 Jumlah dan Proporsi Kepala Keluarga Kabupaten Pasaman Barat tahun 2019 Menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin

No	Status Kawin	Laki-Laki (Jiwa)		Perempuan (Jiwa)		Total	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Belum Kawin	1,083	1.14	464	2.65	1,547	1.38
2	Kawin	91,375	96.23	1,968	11.26	93,343	83.02
3	Cerai Hidup	882	0.93	3,207	18.35	4,089	3.64
4	Cerai Mati	1,616	1.70	11,842	67.74	13,458	11.97
TOTAL		94,956	100	17,481	100	112,437	100

Sumber: Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2019 Ditjen Duk-Capil Kemendagri, diolah

Tabel III.15 menunjukkan data bahwa persentase kepala keluarga dengan status cerai hidup lebih besar pada kepala keluarga berjenis kelamin perempuan (3,207 Jiwa) dibanding dengan kepala keluarga laki-laki (882 Jiwa). Hal ini terjadi karena biasanya laki-laki yang berpisah dari istrinya, baik karena

bercerai maupun karena ditinggal istri yang meninggal, lebih cepat untuk memulai hubungan yang baru dan memutuskan untuk menikah kembali jika dibandingkan dengan perempuan.

Selain itu, perempuan yang berstatus cerai baik hidup maupun mati, mempunyai pertimbangan untuk melakukan kawin ulang terutama apabila mereka telah memiliki anak-anak yang biasanya menjadi tanggungjawab perempuan. Meskipun pada saat ini kecenderungan tersebut sudah mulai menurun tetapi kondisi ini masih terjadi. Faktor yang lain adalah mereka yang cerai mati, terjadi pada kelompok umur yang lebih tua, yang menyebabkan perempuan enggan untuk menikah kembali.

Dalam administrasi kependudukan, perempuan berstatus kawin yang menjadi kepala keluarga juga diberikan kepada mereka yang berstatus istri kedua, ketiga maupun keempat. Oleh sebab itu perempuan kepala keluarga ini dapat diduga mereka yang menjadi isteri kedua, ketiga, dan seterusnya.

d) Jumlah dan Proporsi Kepala Keluarga Menurut Kelompok Umur dan Status Perkawinan

Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel III.16 terlihat bahwa kepala keluarga di Kabupaten Pasaman Barat yang berstatus kawin tertinggi berada pada kelompok umur 35-39 tahun, hal ini menunjukkan bahwa kepala keluarga di Kabupaten Pasaman Barat berada pada kelompok produktif. Oleh sebab itu kiranya perlu dirancang program yang terkait dengan upaya meningkatkan kualitas keluarga dan kesejahteraan keluarga, termasuk peningkatan pelayanan dan akses terhadap kebutuhan ketersediaan alat kontrasepsi untuk pelayanan Keluarga Berencana. Sedangkan kepala keluarga yang berstatus belum kawin terbesar berada pada kelompok umur 20-34 tahun, kepala keluarga yang berstatus cerai hidup tertinggi berada pada kelompok umur 35-54 tahun, serta kepala keluarga berstatus cerai mati tertinggi berada pada kelompok umur 50 tahun ke atas.



Tabel III.17 Jumlah dan Proporsi Kepala Keluarga Kabupaten Pasaman Menurut Kelompok Umur dan Status Perkawinan Tahun 2019

NO	Kelompok Umur	Belum Kawin		Kawin		Cerai Hidup		Cerai Mati		Jumlah KK	
		n(Jiwa)	%	n(Jiwa)	%	n(Jiwa)	%	n(Jiwa)	%	n(Jiwa)	%
1	15-19	23	0.02	11	0.01	0	0.00	0	0.00	34	0.03
2	20-24	238	0.21	1,282	1.14	34	0.03	12	0.01	1,566	1.39
3	25-29	343	0.31	6,066	5.40	167	0.15	53	0.05	6,629	5.90
4	30-34	253	0.23	12,029	10.70	338	0.30	159	0.14	12,779	11.37
5	35-39	175	0.16	14,693	13.07	507	0.45	333	0.30	15,708	13.97
6	40-44	138	0.12	14,359	12.77	539	0.48	566	0.50	15,602	13.88
7	45-49	131	0.12	12,169	10.82	558	0.50	968	0.86	13,826	12.30
8	50-54	90	0.08	10,126	9.01	541	0.48	1,486	1.32	12,243	10.89
9	55-59	46	0.04	8,046	7.16	466	0.41	1,983	1.76	10,541	9.38
10	60-64	54	0.05	6,685	5.95	459	0.41	2,370	2.11	9,568	8.51
11	65-69	21	0.02	4,075	3.62	258	0.23	2,093	1.86	6,447	5.73
12	70-74	12	0.01	1,859	1.65	103	0.09	1,392	1.24	3,366	2.99
13	> 75	23	0.02	1,943	1.73	119	0.11	2,043	1.82	4,128	3.67
TOTAL		1,547	1.38	93,343	83.02	4,089	3.64	13,458	11.97	112,437	100

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2019 Ditjen Duk-Capil Kemendagri, diolah

e) Jumlah dan Proporsi Kepala Keluarga Menurut Kelompok Umur, Status Perkawinan dan Jenis Kelamin

Dari tabel III.17. diperoleh gambaran proporsi tertinggi kepala keluarga laki-laki berstatus kawin berada pada kelompok umur 30-49 tahun, sedangkan proporsi kepala keluarga perempuan yang berstatus kawin berada pada kelompok umur 35-54 tahun. Untuk kepala keluarga dengan status cerai hidup tertinggi, kepala keluarga laki-laki maupun perempuan terletak pada kelompok umur yang sama 35-54.

Tabel III.18 Jumlah Kepala Keluarga Kabupaten Pasaman Barat Menurut Kelompok Umur, Status Perkawinan, dan Jenis Kelamin Tahun 2019

NO	UMUR	Belum Kawin		Kawin		Cerai Hidup		Cerai Mati		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	15-19	13	10	8	3	0	0	0	0	21	13
2	20-24	164	74	1,220	62	3	31	2	10	1,389	177
3	25-29	258	85	5,959	107	29	138	5	48	6,251	378
4	30-34	202	51	11,845	184	95	243	18	141	12,160	619
5	35-39	134	41	14,454	239	115	392	30	303	14,733	975
6	40-44	93	45	14,106	253	144	395	47	519	14,390	1,212
7	45-49	84	47	11,951	218	128	430	109	859	12,272	1,554
8	50-54	57	33	9,900	226	120	421	154	1,332	10,231	2,012
9	55-59	24	22	7,856	190	69	397	227	1,756	8,176	2,365
10	60-64	34	20	6,513	172	78	381	306	2,064	6,931	2,637
11	65-69	8	13	3,937	138	56	202	236	1,857	4,237	2,210
12	70-74	4	8	1,772	87	20	83	182	1,210	1,978	1,388
13	> 75	8	15	1,854	89	25	94	300	1,743	2,187	1,941
TOTAL		1,083	464	91,375	1,968	882	3,207	1,616	11,842	94,956	17,481

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2019 Ditjen Duk-Capil Kemendagri, diolah

Data yang sama ditunjukkan pada kelompok umur tertinggi kepala keluarga berstatus cerai mati, yaitu terletak pada kelompok umur 50-69 tahun baik pada kepala keluarga laki-laki maupun perempuan.

Selanjutnya dari tabel III.17. nampak bahwa perempuan berstatus cerai menjadi kepala keluarga tertinggi berada pada usia 50 keatas, dan diduga kepala keluarga perempuan tersebut memang telah berstatus cerai mati ataupun cerai hidup yang mengharuskan mereka menjadi kepala keluarga. Kondisi ini perlu perhatian lebih lanjut, karena keluarga yang dikepalai perempuan biasanya mempunyai status ekonomi yang rendah, karena perempuan pada umur yang lanjut, biasanya tidak memiliki pekerjaan yang tetap, sehingga kemampuan untuk mencukupi kebutuhan keluarga rendah. Untuk kebutuhan pemberdayaan terhadap keluarga-keluarga tersebut perlu perhatian khusus, apakah anggota keluarganya berstatus bekerja atau tidak bekerja.

Disamping itu, dalam hal intervensi kemiskinan, data keluarga ini juga dibutuhkan karena kemiskinan individu berasal dari kemiskinan keluarga. Oleh sebab itu untuk menangani kemiskinan, unit yang harus diperhatikan adalah unit keluarga atau dengan kata lain melakukan pemberdayaan keluarga, dimana seluruh potensi anggota keluarga harus ditingkatkan.

f) Jumlah dan Proporsi Kepala Keluarga Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin

Hal lain yang menarik untuk dicermati adalah status kepala keluarga dikaitkan dengan pendidikan yang dicapai, karena pendidikan yang dicapai kepala keluarga merupakan salah satu indikator kualitas hidup manusia. Indikator ini dapat digunakan untuk menunjukkan status sosial dan status kesejahteraan seseorang. Semakin tinggi pendidikan yang dicapai oleh seorang kepala keluarga diharapkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan seseorang maupun anggota keluarganya. Jenjang pendidikan yang dicapai kepala keluarga dapat digunakan untuk melihat gambaran kasar kualitas sosial maupun ekonomi dari rumah tangga/keluarga yang bersangkutan.



Tabel III.18. Jumlah dan Proporsi Kepala Keluarga Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Menurut Pendidikan Terakhir dan Jenis Kelamin

No	Pendidikan	Laki-Laki (Jiwa)		Perempuan (Jiwa)		Total	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Tidak/Belum Sekolah	1,700	1.79	1,227	7.02	2,927	2.60
2	Belum Tamat SD/Sederajat	4,226	4.45	1,734	9.92	5,960	5.30
3	Tamat SD/Sederajat	33,523	35.30	8,529	48.79	42,052	37.40
4	SLTP/Sederajat	21,703	22.86	2,801	16.02	24,504	21.79
5	SLTA/Sederajat	27,135	28.58	2,499	14.30	29,634	26.36
6	Diploma I/II	734	0.77	173	0.99	907	0.81
7	Akademi/Diploma III/Sarmud	1,149	1.21	124	0.71	1,273	1.13
8	Diploma IV/Strata I	4,549	4.79	385	2.20	4,934	4.39
9	Strata II	231	0.24	9	0.05	240	0.21
10	Strata III	6	0.01	0	0.00	6	0.01
TOTAL		94,956	100	17,481	100	112,437	100

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2019 Ditjen Duk-Capil Kemendagri, diolah

Dari tabel III.18. terlihat bahwa kualitas kepala keluarga Kabupaten Pasaman Barat menurut tingkat pendidikan formal yang ditamatkan pada tahun 2019 relatif rendah. Sebagian besar kepala keluarga baru menamatkan sekolah SD (37,40%), tidak/belum sekolah sebanyak 2,60 persen dan tidak tamat SD sebanyak 5,30 persen. Jika dilihat dari jenis kelamin, kepala keluarga yang tamat SD/ sederajat lebih banyak terdapat pada kepala keluarga laki-laki dibandingkan dengan perempuan, perbandingannya kira-kira 4:1. Demikian pula kepala keluarga yang tidak sekolah maupun tidak tamat SD/ sederajat lebih banyak didominasi oleh laki-laki dibandingkan perempuan.

Dari analisa data diatas, maka dugaan keluarga yang dikepalai perempuan akan mempunyai status ekonomi yang lebih rendah dibandingkan keluarga yang dikepalai laki-laki mendekati kenyataan. Selain itu, kepala keluarga yang mempunyai pendidikan rendah diduga mempunyai pendapatan yang rendah, sehingga diduga mereka tidak mampu memberikan pendidikan yang tinggi bagi anggota keluarganya. Biasanya kepala keluarga yang berpendidikan rendah akan bekerja disektor informal.

Melihat kondisi pendidikan kepala keluarga di atas, maka pemerintah Kabupaten Pasaman Barat harus memberikan perhatian serius. Karena proses globalisasi yang sedang berlangsung, maka pemerintah Kabupaten Pasaman Barat perlu meningkatkan pendidikan penduduknya agar mempunyai daya saing global.

g) Jumlah dan Proporsi Kepala Keluarga Menurut Jenis Pekerjaan dan Jenis Kelamin

Jika dikaitkan dengan ekonomi, maka status ekonomi keluarga dapat dilihat dari kegiatan ekonomi kepala keluarga maupun anggota serta seberapa besar sumbangan mereka terhadap ekonomi keluarga. Oleh sebab itu informasi mengenai kepala keluarga menurut status pekerjaan perlu diketahui untuk perencanaan pelayanan kebutuhan dasar penduduk.

Tabel III.20 Jumlah dan Proporsi Kepala Keluarga Kab. Pasaman Barat Tahun 2019 Menurut Pekerjaan dan Jenis Kelamin

No	Status Bekerja	Laki-Laki (Jiwa)		Perempuan (Jiwa)		Total	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Bekerja	93,813	98.80	8,429	48.22	102,242	90.93
2	Belum/Tidak Bekerja	348	0.37	396	2.27	744	0.66
3	Pelajar/mahasiswa	251	0.26	100	0.57	351	0.31
4	Pensiunan	544	0.57	108	0.62	652	0.58
5	Mengurus Rumah Tangga	-	0.00	8,448	48.33	8,448	7.51
TOTAL		94,956	100	17,481	100	112,437	100

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester II tahun 2019 Ditjen Duk-Capil Kemendagri, diolah

Tabel III.19. menunjukkan kegiatan ekonomi dari 90,93 persen kepala keluarga di Kabupaten Pasaman Barat berstatus bekerja. Jika dilihat menurut jenis kelamin, proporsi kepala keluarga laki-laki yang bekerja lebih besar (93.813 Jiwa) dibandingkan kepala keluarga perempuan (8.429 Jiwa). Hal ini menunjukkan bahwa peran dan fungsi laki-laki adalah penanggungjawab ekonomi keluarga, sehingga lebih banyak yang harus terjun ke pasar kerja, sementara perempuan biasanya hanya berfungsi sebagai ibu rumah tangga yang bertanggungjawab atas terselenggaranya keluarga yang bersangkutan. Meskipun demikian, perempuan pada masa kini mulai ikut terjun ke pasar kerja.

Untuk kepala keluarga dengan pekerjaan mengurus rumah tangga, terlihat bahwa hanya kepala keluarga perempuan, sementara kepala keluarga laki-laki tidak ada yang bekerja mengurus rumah tangga. Sedangkan kepala keluarga yang sudah pensiun sebesar 0,58 persen dimana jumlah kepala keluarga laki-laki yang pensiun lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah kepala keluarga perempuan yang pensiun. Kemudian yang perlu menjadi perhatian adalah adanya keluarga yang dikepalai oleh kepala keluarga yang



tidak bekerja yakni 0,66 persen dan kepala keluarga yang masih berstatus pelajar/mahasiswa 0,31 persen.

Untuk itu pemerintah Kabupaten Pasaman Barat perlu memperhatikan keluarga yang dikepalai oleh kepala keluarga yang tidak bekerja, walaupun proporsi mereka sangat kecil. Kepala keluarga yang tidak bekerja, dapat disebabkan karena sudah memasuki usia pensiun atau memang tidak mampu masuk ke pasar kerja. Untuk mereka ini perlu diberikan intervensi untuk membantu meningkatkan status kesejahteraan mereka, karena pada umumnya keluarga yang dikepalai oleh kepala keluarga yang tidak bekerja memiliki status ekonomi yang rendah. Karena bagaimana mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan diduga mereka tidak mempunyai penghasilan, sehingga pemerintah Kabupaten Pasaman Barat perlu membuat perencanaan pelayanan kebutuhan dasar penduduk.

2. Kualitas Penduduk

Kualitas penduduk biasanya diukur dari tingkat kesehatan, pendidikan, masalah sosial dan lain sebagainya. Secara internasional kualitas pembangunan manusia diukur dengan indikator pembangunan manusia yang terdiri dari tingkat pendidikan (angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah), kesehatan, (angka kematian bayi dan angka harapan hidup waktu lahir) serta kesejahteraan yang diukur dengan penghasilan perkapita.

a. Kelahiran (Fertilitas)

1) Angka Kelahiran Kasar (*Crude Birth Rate*)

Angka kelahiran kasar merupakan banyaknya kelahiran di suatu daerah pada tahun tertentu per 1.000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama. Angka kelahiran kasar ini berguna untuk mengetahui tingkat kelahiran yang terjadi di suatu daerah baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten/kota. Angka Kelahiran Kasar di Kabupten Pasaman Barat tertera pada tabel berikut:

**Tabel III.21 Angka Kelahiran Kasar Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019
Menurut Kecamatan**

NO	KECAMATAN	Jumlah Kelahiran 2019	Pertengahan Tahun (Des 2019 + Des 2018/2)	CBR
1	SUNGAI BEREMAS	563	27,420	20.53
2	LEMBAH MELINTANG	1,002	49,880	20.09
3	PASAMAN	1,308	75,592	17.30
4	TALAMAU	515	30,714	16.77
5	KINALI	1,638	70,854	23.12
6	GUNUNG TULEH	428	24,615	17.39
7	RANAH BATAHAN	517	27,176	19.02
8	KOTO BALINGKA	573	30,440	18.82
9	SUNGAI AUR	674	35,637	18.91
10	LUHAK NAN DUO	807	45,012	17.93
11	SASAK RANAH PESISIR	262	15,331	17.09
TOTAL		8,287	432,668	19.15

Sumber : - Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2019 Ditjen Duk-Capil Kemendagri, diolah
b. Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat

Dari tabel III.20. terlihat Angka Kelahiran Kasar di Kabupaten Pasaman Barat sebesar 19,15 yang berarti bahwa setiap 1.000 penduduk Kabupaten Pasaman Barat pada pertengahan tahun 2019 terjadi rata-rata 19-20 kelahiran hidup. Dari tabel yang sama juga terlihat angka kelahiran kasar tertinggi terjadi di Kecamatan Kinali dan angka kelahiran kasar terkecil berada di Kecamatan Talamau.

2) Angka Kelahiran Umum (*General Birth Rate*)

Angka kelahiran umum merupakan banyaknya kelahiran di suatu daerah pada tahun tertentu per 1.000 penduduk wanita usia subur (15-45) Angka kelahiran umum merupakan indikator kelahiran yang lebih baik dibandingkan angka kelahiran kasar. Angka Kelahiran Umum di Kabupten Pasaman Barat tertera pada tabel berikut :

**Tabel III.22 Angka Kelahiran Umum Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019
Menurut Kecamatan**

NO	KECAMATAN	Jumlah Kelahiran 2019	Jumlah Penduduk Wanita Usia Subur (15 - 45 Tahun)	GBR
1	SUNGAI BEREMAS	563	8,586	65.57
2	LEMBAH MELINTANG	1,002	14,418	69.50
3	PASAMAN	1,308	23,110	56.60
4	TALAMAU	515	8,736	58.95
5	KINALI	1,638	22,487	72.84
6	GUNUNG TULEH	428	6,868	62.32
7	RANAH BATAHAN	517	7,924	65.24
8	KOTO BALINGKA	573	9,629	59.51
9	SUNGAI AUR	674	11,606	58.07



10	LUHAK NAN DUO	807	13,017	62.00
11	SASAK RANAH PESISIR	262	4,660	56.22
TOTAL		8,287	131,041	63.24

Sumber : - Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2018 Ditjen Duk-Capil Kemendagri, diolah
b. Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat

Dari tabel III.21 terlihat Angka Kelahiran Umum di Kabupaten Pasaman Barat sebesar 63,24 yang berarti bahwa setiap 1.000 penduduk wanita usia subur Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2019 terjadi 63 - 64 kelahiran hidup. Dari tabel yang sama juga terlihat angka kelahiran umum tertinggi terjadi di Kecamatan Kinali dan angka kelahiran umum terkecil berada di Kecamatan Sasak Ranah Pesisir.

3) Rasio Anak dan Perempuan (*Child Women Ratio*)

Rasio perempuan adalah perbandingan antara anak dibawah usia lima tahun dengan jumlah penduduk perempuan usia produktif (15-45 tahun) disuatu wilayah dan waktu tertentu. Rasio anak dan perempuan bisa digunakan untuk melihat jumlah kelahiran yang terjadi selama 5 tahun yang lalu.

Tabel III.23 Rasio Anak dan Perempuan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Menurut Kecamatan

NO	KECAMATAN	Jumlah Anak Usia 0-5 Tahun	Jumlah Penduduk Wanita Usia Subur (15 - 45 Tahun)	CWR
1	SUNGAI BEREMAS	1,970	8,586	22.94
2	LEMBAH MELINTANG	3,346	14,418	23.21
3	PASAMAN	5,387	23,110	23.31
4	TALAMAU	2,013	8,736	23.04
5	KINALI	5,097	22,487	22.67
6	GUNUNG TULEH	1,807	6,868	26.31
7	RANAH BATAHAN	1,808	7,924	22.82
8	KOTO BALINGKA	2,231	9,629	23.17
9	SUNGAI AUR	2,636	11,606	22.71
10	LUHAK NAN DUO	3,174	13,017	24.38
11	SASAK RANAH PESISIR	1,054	4,660	22.62
TOTAL		30,523	131,041	23.29

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2019 Ditjen Duk-Capil Kemendagri, diolah

Pada tahun 2019, besarnya rasio anak dan perempuan (*Child Women Ratio-CWR*) di Kabupaten Pasaman Barat sebesar 23,29 Hal ini berarti bahwa diantara 100 perempuan usia subur terdapat 23 - 24 balita. Angka ini mengindikasikan tingkat fertilitas naik dari tahun 2018 (Naik sebesar 5,24 persen). CWR tertinggi di wilayah Kecamatan Gunung Tuleh yaitu 26,31

sedangkan CWR terendah di wilayah Kecamatan Sasak Ranah Pesisir sebesar 22,62, dan Kecamatan Kinali sebesar 22,67.

b. Pendidikan

Indikator untuk mengukur kualitas penduduk di bidang pendidikan di suatu wilayah antara lain dapat dilihat dari Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni, Angka Putus Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah.

a. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka partisipasi kasar mengukur daya serap sektor pendidikan terhadap penduduk usia sekolah tanpa melihat umur siswa pada masing-masing jenjang pendidikan.

**Tabel III.24 Angka Partisipasi Kasar SD
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019**

NO	KECAMATAN	Jumlah Penduduk Usia SD	Jumlah Siswa SD	APK
1	SUNGAI BEREMAS	3,667	3,444	93.92
2	LEMBAH MELINTANG	6,923	5,793	83.68
3	PASAMAN	9,614	10,278	106.91
4	TALAMAU	3,481	3,316	95.26
5	KINALI	8,986	8,856	98.55
6	GUNUNG TULEH	3,111	3,076	98.87
7	RANAH BATAHAN	3,323	3,617	108.85
8	KOTO BALINGKA	4,048	4,380	108.20
9	SUNGAI AUR	4,752	4,872	102.53
10	LUHAK NAN DUO	5,336	5,291	99.16
11	SASAK RANAH PESISIR	1,740	1,829	105.11
TOTAL		54,981	54,752	99.58

Sumber : - Data Konsolidasi Bersih Semester 2 Tahun 2019 Ditjen Duk-Capil Kemendagri, diolah
- Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat

Angka Partisipasi Kasar SD di Kabupaten Pasaman Barat berada di bawah 100, artinya masih terdapat penduduk usia sekolah yang tidak melaksanakan pendidikan pada jenjang pendidikan SD dan semakin tinggi APK semakin banyak penduduk usia sekolah yang bersekolah. Dari tabel III.32 terlihat bahwa terdapat 5 (lima) Kecamatan dengan APK diatas 100, yaitu Kecamatan Pasaman, Ranah Batahan, Koto Balingka, Sungai Aur dan Sasak Ranah Pesisir. Dari data tersebut dapat diartikan bahwa terdapat penduduk yang belum cukup usia SD sudah terdaftar sebagai siswa SD atau penduduk yang sudah melebihi



usia SD masih terdaftar sebagai siswa SD di Kecamatan-Kecamatan tersebut. APK SD tertinggi di Kabupaten Pasaman Barat terdapat di Kecamatan Ranah Batahan yaitu sebesar 108,85 sedangkan APK terendah berada di Kecamatan Lembah Melintang yaitu sebesar 83,68.

b. Angka Putus Sekolah (APS)

Angka Putus Sekolah menunjukkan persentase murid yang putus sekolah menurut jenjang pendidikan tertentu.

Tabel III.25 Angka Putus Sekolah SD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019

NO	KECAMATAN	Jumlah Penduduk Usia SD	Jumlah Siswa SD Putus Sekolah	APS
1	SUNGAI BEREMAS	3,667	3	0.08
2	LEMBAH MELINTANG	6,923	7	0.10
3	PASAMAN	9,614	0	0.00
4	TALAMAU	3,481	0	0.00
5	KINALI	8,986	7	0.08
6	GUNUNG TULEH	3,111	0	0.00
7	RANAH BATAHAN	3,323	11	0.33
8	KOTO BALINGKA	4,048	0	0.00
9	SUNGAI AUR	4,752	8	0.17
10	LUHAK NAN DUO	5,336	0	0.00
11	SASAK RANAH PESISIR	1,740	0	0.00
TOTAL		54,981	36	0.07

Sumber : - Data Konsolidasi Bersih Semester 2 Tahun 2019 Ditjen Duk-Capil Kemendagri, diolah
b. Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat

Angka Putus Sekolah SD tertinggi di Kabupaten Pasaman Barat terjadi di Kecamatan Ranah Batahan sebesar 0,33 % sedangkan APS SD terendah ada di Kecamatan Pasaman, Talamau, Gunung Tuleh, Koto Balingka, Luhak Nan Duo dan Sasak Ranah Pesisir.

3) Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Pada tabel di bawah ini disajikan rata-rata lama sekolah menurut kecamatan dan jenis kelamin, dimana untuk kabupaten Pasaman Barat rata-rata lama sekolah penduduk mencapai 6,72 tahun. Hal ini berarti rata-rata penduduk Kabupaten Pasaman Barat hanya mampu mencapai pendidikan SD atau kelas satu SLTP.

Tabel III.26 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019

NO	KECAMATAN	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		
		laki-laki	Perempuan	Rata-rata Total
1	SUNGAI BEREMAS	6.66	7.03	6.85
2	LEMBAH MELINTANG	7.05	7.20	7.13
3	PASAMAN	7.04	7.18	7.11
4	TALAMAU	6.18	6.34	6.26
5	KINALI	6.01	5.95	5.98
6	GUNUNG TULEH	7.07	7.28	7.18
7	RANAH BATAHAN	7.07	7.17	7.12
8	KOTO BALINGKA	6.33	6.29	6.31
9	SUNGAI AUR	6.61	6.78	6.70
10	LUHAK NAN DUO	7.08	7.13	7.11
11	SASAK RANAH PESISIR	6.16	6.22	6.19
RATA-RATA		6.66	6.78	6.72

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2019 Ditjen Duk-Capil Kemendagri, diolah

Jika dilihat dari jenis kelamin, rata-rata lama sekolah penduduk laki-laki dan perempuan relatif sama, yaitu hanya mampu menamatkan pendidikan SD. Rendahnya rata-rata lama sekolah di Kabupaten Pasaman Barat dapat disebabkan karena belum termutakhirkan data pendidikan penduduk secara menyeluruh di Kabupaten ini. Untuk itu perlu diupayakan updating data pendidikan bagi penduduk pada saat pemberian pelayanan dokumen kependudukan baik dokumen KK, KTP, akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian dan dokumen lainnya. Jika dilihat per kecamatan maka penduduk di Kecamatan Gunung Tuleh dan Kecamatan Lembah Melintang merupakan penduduk yang memiliki rata-rata lama sekolah tertinggi dan penduduk yang memiliki rata-rata lama sekolah terendah adalah penduduk di Kecamatan Kinali.

c. Ekonomi

Dari sisi ekonomi, ketenagakerjaan merupakan salah satu isu penting di samping keadaan angkatan kerja (*economically active population*) dan struktur ketenagakerjaan yakni isu pengangguran. Karena permasalahan pengangguran erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi seiring dengan penyerapan tenaga kerja atau dengan kata lain, jika ada pertumbuhan ekonomi ada otomatis penyerapan tenaga kerja juga ada. Target nasional tahun 2012 setiap pertumbuhan ekonomi satu persen, tenaga kerja yang terserap mencapai 450 ribu orang. Dalam ilmu ekonomi, salah satu faktor produksi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah tenaga kerja.



Ketersediaan lapangan kerja yang relatif terbatas, tidak mampu menyerap para pencari kerja yang senantiasa bertambah setiap tahun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Akibat tidak sebandingnya ketersediaan lapangan kerja dengan jumlah angkatan kerja atau ketidakmampuan pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia berdampak banyaknya angkatan kerja yang tidak dapat masuk ke pasar kerja (pengangguran).

Tingginya angka pengangguran tidak hanya menimbulkan masalah-masalah di bidang ekonomi, melainkan juga menimbulkan berbagai masalah di bidang sosial, seperti kemiskinan dan kerawanan sosial. Data tentang situasi ketenagakerjaan merupakan salah satu data pokok yang dapat menggambarkan kondisi perekonomian, sosial, bahkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah dan dalam suatu/kurun waktu tertentu.

a. Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja

Tenaga kerja (*Manpower*) dapat dipilah menjadi dua kelompok yaitu angkatan kerja (*labor force*) dan bukan angkatan kerja. Yang termasuk angkatan kerja ialah penduduk dalam usia kerja (15-64 tahun) yang bekerja dan yang tidak bekerja. Sedangkan yang termasuk bukan angkatan kerja ialah penduduk usia kerja yang pekerjaannya adalah mengurus rumah tangga, pelajar/mahasiswa dan pensiunan. Selanjutnya angkatan Kerja dibagi 2 (dua) yaitu bekerja (*employed*) dan mencari pekerjaan/menganggur (*unemployed*). Batas usia kerja penduduk yang diberlakukan pada profil perkembangan kependudukan Kabupaten Pasaman Barat ini adalah penduduk berusia 15-64 tahun karena dianggap mempunyai potensi untuk bekerja secara produktif dan merupakan modal bagi bergeraknya roda pembangunan.

Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Pertumbuhan tenaga kerja yang kurang diimbangi dengan pertumbuhan lapangan kerja akan menyebabkan tingkat kesempatan kerja cenderung menurun. Dengan demikian jumlah penduduk yang bekerja tidak selalu menggambarkan jumlah kesempatan kerja yang ada. Hal ini dikarenakan sering terjadinya *mismatch* dalam pasar kerja. Sekitar 67,32 persen penduduk Kabupaten Pasaman Barat termasuk dalam batas usia kerja (15-64 tahun) sedangkan sisanya sekitar 32,68 persen tidak

tergolong penduduk usia kerja karena berumur dibawah 15 tahun dan lebih dari 64 tahun.

Tabel III.26. memperlihatkan data kecamatan yang mempunyai jumlah tenaga kerja dengan persentase terbesar terdapat di Kecamatan Sasak Ranah Pesisir yaitu sebesar 68,68 persen diikuti dengan Kecamatan ranah Batahan 67,91 persen, dan Kecamatan Talamau 67,73 persen. Sedangkan kecamatan dengan persentase jumlah tenaga kerja terkecil terdapat di Kecamatan Lembah Melintang sebanyak 66,49 persen.

**Tabel III.27 Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Menurut Kecamatan**

NO	KECAMATAN	Jumlah Penduduk	Jumlah Tenaga Kerja (Penduduk Usia Kerja 15-64 Tahun)	Tenaga Kerja (%)
1	SUNGAI BEREMAS	27,491	18,458	67.14
2	LEMBAH MELINTANG	49,959	33,216	66.49
3	PASAMAN	75,970	51,343	67.58
4	TALAMAU	30,599	20,724	67.73
5	KINALI	71,121	47,919	67.38
6	GUNUNG TULEH	24,805	16,579	66.84
7	RANAH BATAHAN	27,425	18,623	67.91
8	KOTO BALINGKA	30,716	20,570	66.97
9	SUNGAI AUR	35,830	23,887	66.67
10	LUHAK NAN DUO	44,509	30,139	67.71
11	SASAK RANAH PESISIR	15,336	10,533	68.68
TOTAL		433,761	291,991	67.32

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2019 Ditjen Duk-Capil Kemendagri, diolah

Jumlah tenaga kerja dapat pula dilihat menurut struktur umur sebagai berikut:

**Tabel III.28 Jumlah Tenaga Kerja (Penduduk Usia Kerja) Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2019 Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin**

NO	KELOMPOK UMUR	JENIS KELAMIN				PENDUDUK	
		LAKI-LAKI		PEREMPUAN			
		n(JIWA)	(%)	n(JIWA)	(%)	n(JIWA)	(%)
1	15-19	23,397	8.01	22,136	7.58	45,533	15.59
2	20-24	21,044	7.21	20,257	6.94	41,301	14.14
3	25-29	17,738	6.07	17,105	5.86	34,843	11.93
4	30-34	17,152	5.87	16,562	5.67	33,714	11.55
5	35-39	16,959	5.81	16,711	5.72	33,670	11.53
6	40-44	14,600	5.00	14,368	4.92	28,968	9.92
7	45-49	12,172	4.17	12,044	4.12	24,216	8.29
8	50-54	9,914	3.40	10,148	3.48	20,062	6.87
9	55-59	8,295	2.84	8,741	2.99	17,036	5.83
10	60-64	6,210	2.13	6,438	2.20	12,648	4.33
JUMLAH		147,481	50.51	144,510	49.49	291,991	100

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2019 Ditjen Duk-Capil Kemendagri, diolah



Tabel III.37. menunjukkan pula bahwa persentase tenaga kerja laki-laki lebih tinggi (50,51%) dibandingkan tenaga kerja perempuan (49,49%). Persentase tenaga kerja tertinggi berada pada kelompok umur 15-39 tahun. Demikian juga halnya dengan tenaga kerja laki-laki dan perempuan.

Selanjutnya, dari data di atas dapat diketahui bahwa semakin besar jumlah tenaga kerja di suatu daerah, maka penawaran tenaga kerja (*supply of labor*) juga semakin tinggi. Namun apabila tidak diikuti dengan permintaan akan tenaga kerja (*demand of labor*), maka akan terjadi pengangguran yang cukup tinggi pula.

b. Angkatan Kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Angkatan kerja di Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2019 berjumlah 151,869 orang. Angkatan kerja yang tinggi akan membawa beban yang tersendiri bagi perekonomian, yakni penciptaan atau perluasan lapangan pekerjaan. Jika lowongan pekerjaan tidak mampu menampung semua angkatan kerja (permintaan akan tenaga kerja lebih sedikit dari pada penawaran angkatan kerja), maka sebagian angkatan kerja akan menambah pengangguran. Penciptaan lapangan pekerjaan inilah yang menjadi salah masalah di bidang perekonomian. Kerawanan ini tidak hanya menyangkut masalah jumlah, yakni bagaimana memacu jumlah yang diminta agar mampu menyerap jumlah yang ditawarkan, akan tetapi juga masalah terkait dengan kualitas penduduk seperti tercermin dari pendidikan.

Tabel III.38. memperlihatkan tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Pasaman Barat sebesar 52,01 yang berarti hanya terdapat 52,01 persen penduduk usia kerja (15-64 tahun) yang terlibat dalam kegiatan produktif. TPAK tertinggi terdapat di Kecamatan Koto Balingka yaitu sebesar 56,50 sedangkan terendah Kecamatan Sungai Beremas sebesar 48,12.

Tabel III.29 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Menurut Kecamatan

NO	KECAMATAN	TDK BEKERJA	BEKERJA	ANGKATAN KERJA	BUKAN ANGKATAN KERJA	TENAGA KERJA	TPAK
1	SUNGAI BEREMAS	1,804	7,078	8,882	9,908	18,458	48.12
2	LEMBAH MELINTANG	2,499	15,755	18,254	15,504	33,216	54.96

3	PASAMAN	3,775	23,239	27,014	24,998	51,343	52.61
4	TALAMAU	1,645	9,330	10,975	9,826	20,724	52.96
5	KINALI	3,793	19,293	23,086	25,547	47,919	48.18
6	GUNUNG TULEH	1,148	7,974	9,122	7,610	16,579	55.02
7	RANAH BATAHAN	1,810	8,594	10,404	8,435	18,623	55.87
8	KOTO BALINGKA	1,854	9,789	11,643	9,256	20,570	56.60
9	SUNGAI AUR	1,995	10,752	12,747	11,612	23,887	53.36
10	LUHAK NAN DUO	2,012	12,657	14,669	15,875	30,139	48.67
11	SASAK RANAH PESISIR	829	4,244	5,073	5,540	10,533	48.16
TOTAL		23,164	128,705	151,869	144,111	291,991	52.01

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2019 Ditjen Duk-Capil Kemendagri, diolah

Jika dilihat dari jenis kelamin dari Tabel III.39. terlihat bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki (75,38%) lebih tinggi dibandingkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (28,17%). Ini mencerminkan peluang tenaga kerja perempuan untuk terlibat di pasar kerja masih rendah. Hal ini diduga kelompok perempuan lebih banyak masuk pada kelompok bukan usia kerja, misalnya mengurus rumah tangga. Hal ini terlihat hampir untuk seluruh kecamatan.

Tabel III.30 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

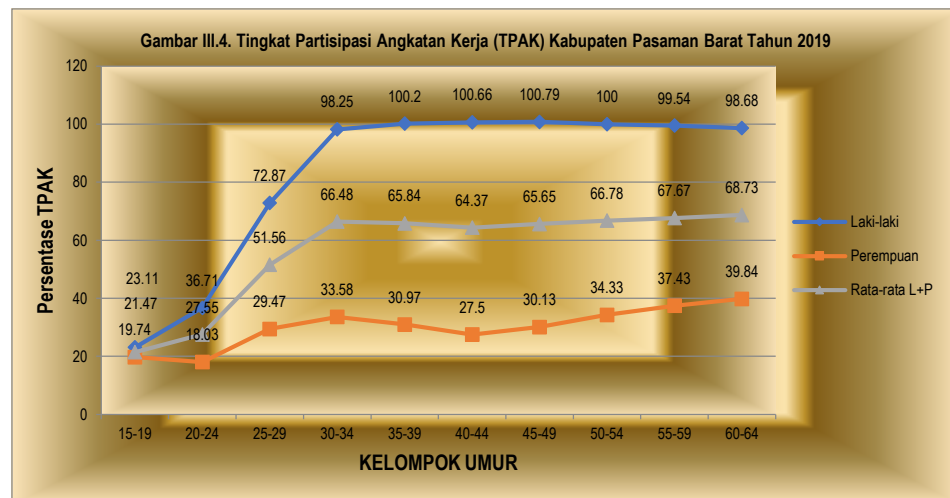
NO	KELOMPOK UMUR	Jumlah Angkatan Kerja			Jumlah Tenaga Kerja			TPAK		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	15-19	5,408	4,370	9,778	23,397	22,136	45,533	23.11	19.74	21.47
2	20-24	7,726	3,653	11,379	21,044	20,257	41,301	36.71	18.03	27.55
3	25-29	12,925	5,041	17,966	17,738	17,105	34,843	72.87	29.47	51.56
4	30-34	16,851	5,562	22,413	17,152	16,562	33,714	98.25	33.58	66.48
5	35-39	16,993	5,176	22,169	16,959	16,711	33,670	100.20	30.97	65.84
6	40-44	14,696	3,951	18,647	14,600	14,368	28,968	100.66	27.50	64.37
7	45-49	12,268	3,629	15,897	12,172	12,044	24,216	100.79	30.13	65.65
8	50-54	9,914	3,484	13,398	9,914	10,148	20,062	100.00	34.33	66.78
9	55-59	8,257	3,272	11,529	8,295	8,741	17,036	99.54	37.43	67.67
10	60-64	6,128	2,565	8,693	6,210	6,438	12,648	98.68	39.84	68.73
JUMLAH		111,166	40,703	151,869	147,481	144,510	291,991	75.38	28.17	52.01

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2019, Ditjen Duk-Capil Kemendagri, diolah

Jika dilihat dari kelompok umur, TPAK tertinggi berada pada kelompok umur 60-64 tahun untuk angkatan kerja perempuan dan TPAK tertinggi untuk angkatan kerja laki-laki berada pada kelompok umur 45-49 tahun. Jika



digambarkan secara keseluruhan, tingkat partisipasi angkatan kerja menurut umur dan jenis kelamin terlihat seperti gambar berikut :



Perlu diperhatikan adalah sebanyak 9.778 angkatan kerja berusia muda yaitu 15-19 tahun. Kelompok ini seharusnya masih duduk di bangku sekolah. Mereka terpaksa berhenti sekolah dan masuk ke pasar kerja, Jika kelompok ini tidak memperoleh perhatian, maka mereka akan menjadi tenaga kerja yang rendah kualitasnya sehingga berpengaruh terhadap penghasilan mereka. Secara keseluruhan, pola partisipasi angkatan kerja menurut umur ini berbeda antara laki-laki dan perempuan, seperti terlihat pada gambar III.4. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan jauh berada di bawah TPAK laki-laki sejak usia 25 tahun. Partisipasi perempuan di pasar kerja hanya sekitar 28.17 persen dari seluruh penduduk perempuan. Kemungkinan hal ini terkait dengan kesibukan perempuan sebagai pengelola rumah tangga. Akan tetapi, keadaan ini mungkin juga terkait dengan budaya yang menganggap bahwa tempat perempuan adalah di dalam rumah dan laki-laki di luar rumah.

c. Pengangguran

Pengangguran merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik yang belum pernah bekerja maupun yang sudah pernah bekerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan

pekerjaan atau mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan mereka yang putus asa untuk memperoleh pekerjaan.

Tabel III.40 menunjukkan angkatan kerja yang menganggur menurut pengelompokan umur lima tahunan. Dari tabel III.40. terlihat bahwa pengangguran didominasi oleh kelompok umur muda yakni 15-19 tahun, 20-24 tahun, dan 25-29 tahun. Diantara kelompok umur tersebut, kelompok umur 20-24 tahun yang paling besar jumlahnya.

**Tabel III.31 Jumlah Pengangguran Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019
Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin**

NO	KELOMPOK UMUR	Penduduk Tidak Bekerja			Jumlah Angkatan Kerja			Tingkat Pengangguran (%)		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	15-19	1,088	875	1,963	5,408	4,370	9,778	20.12	20.02	20.08
2	20-24	1,442	1,108	2,550	7,726	3,653	11,379	18.66	30.33	22.41
3	25-29	1,848	1,465	3,313	12,925	5,041	17,966	14.30	29.06	18.44
4	30-34	1,083	836	1,919	16,851	5,562	22,413	6.43	15.03	8.56
5	35-39	2,115	1,543	3,658	16,993	5,176	22,169	12.45	29.81	16.50
6	40-44	862	604	1,466	14,696	3,951	18,647	5.87	15.29	7.86
7	45-49	1,184	912	2,096	12,268	3,629	15,897	9.65	25.13	13.18
8	50-54	1,116	932	2,048	9,914	3,484	13,398	11.26	26.75	15.29
9	55-59	1,225	974	2,199	8,257	3,272	11,529	14.84	29.77	19.07
10	60-64	1,062	890	1,952	6,128	2,565	8,693	17.33	34.70	22.45
JUMLAH		13,025	10,139	23,164	111,166	40,703	151,869	11.72	24.91	15.25

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2019, Ditjen Duk-Capil Kemendagri, diolah

Jumlah pengangguran tertinggi pada kelompok umur 20-24 tahun yakni 22,41 persen. Selanjutnya jumlah pengangguran terendah berada pada kelompok umur 40-44 tahun yakni 7,86 persen. Pengangguran yang berumur 15-19 tahun jumlahnya mencapai 20,08 persen. Pengangguran pada kelompok umur 15-19 tahun menunjukkan bahwa mereka tidak lagi dapat melanjutkan pendidikan sehingga terpaksa mencari pekerjaan pada umur sekolah. Penduduk kelompok umur 15-19 tahun ini seharusnya masih duduk di bangku pendidikan dan belum masuk ke pasar kerja. Hal ini perlu perhatian khusus dari pemerintah Kabupaten Pasaman Barat untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan serta meningkatkan akses masyarakat untuk memperoleh pendidikan dan ketrampilan.



Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa pengangguran pada kelompok umur muda ini harus ditangani dengan baik seperti misalnya memberikan bekal keterampilan khusus melalui Balai Latihan Kerja (BLK) maupun training-training sesuai permintaan pasar sehingga mereka dapat terserap di pasar kerja. Jika pengangguran ini tidak ditangani dengan baik dikhawatirkan akan mempunyai implikasi sosial yang luas disebabkan mereka tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan, sebagai contoh kriminalitas. Indikator ini sangat penting sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan.

Jika dilihat menurut jenis kelamin, jumlah pengangguran perempuan lebih besar daripada laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa angkatan kerja perempuan sedikit lebih sulit untuk mendapatkan pekerjaan dibandingkan dengan laki-laki.

d. Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani dan sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/keterpencilan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana.

Para penyandang masalah kesejahteraan sosial tersebut perlu dibina melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sesuai dengan pasal 6 UU NO. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Salah satu jenis PMKS yang dapat disajikan dari database kependudukan adalah penyandang disabilitas (penyandang cacat). Data dan informasi tentang banyaknya penduduk penyandang cacat dan jenis kecacatannya sangat diperlukan dalam rangka memberikan program pelayanan publik, dasar perencanaan pembangunan berbagai fasilitas umum yang ramah penyandang cacat, pelayanan fasilitas pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja dan lain sebagainya. Selama ini perhatian pemerintah dianggap masih kurang dan masih banyak perlakuan diskriminatif dalam pelayanan publik kepada kelompok ini dan kebijakan pemerintah

terhadap penyandang disabilitas (penyandang cacat) masih bersifat *charity* (belas kasihan). Kurangnya sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan penyandang disabilitas ini menyebabkan perlakuan yang kurang peduli, seperti berbagai kantor pelayanan publik belum ramah penyandang cacat terutama cacat fisik, bahkan untuk pelayanan administrasi kependudukan.

Tabel III.32 Jumlah Penduduk Penyandang Disabilitas Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Menurut Kecamatan

NO	KECAMATAN	PENYANDANG CACAT						TOTAL
		Fisik	Netra/ Buta	Rungu/ Wicara	Mental/ Jiwa	Fisik & Mental	Lainny a	
		(Jiwa)	(Jiwa)	(Jiwa)	(Jiwa)	(Jiwa)	(Jiwa)	
1	SUNGAI BEREMAS	1	2	2	1	0	0	6
2	LEMBAH MELINTANG	6	4	5	6	2	3	26
3	PASAMAN	10	3	11	10	7	3	44
4	TALAMAU	6	8	7	14	6	4	45
5	KINALI	10	1	3	10	3	2	29
6	GUNUNG TULEH	9	3	6	6	0	1	25
7	RANAH BATAHAN	1	4	1	0	1	4	11
8	KOTO BALINGKA	4	0	4	5	1	1	15
9	SUNGAI AUR	6	4	0	4	0	2	16
10	LUHAK NAN DUO	5	1	2	5	2	3	18
11	SASAK RANAH PESISIR	4	2	3	5	0	1	15
KABUPATEN PASAMAN BARAT		62	32	44	66	22	24	250

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2019, Ditjen Duk-Capil Kemendagri, diolah

Pada tabel III.41 terlihat bahwa jumlah penduduk penyandang disabilitas di Kabupaten Pasaman Barat yang terdata dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAD) tidak terlalu besar yakni 221 jiwa jika dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk Kabupaten Pasaman Barat yaitu 431.575 jiwa (0,05%). Meskipun proporsinya kecil, penduduk penyandang cacat tetap harus menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dan tetap wajib memberikan pelayanan sosial bagi mereka seperti pendidikan, kesehatan, dan fasilitas layanan umum lainnya. Dilihat dari jumlah, penyandang cacat terbesar berada di Kecamatan Talamau yakni 40 orang, diikuti Kecamatan Pasaman yakni 35 orang, dan Kecamatan Lembah Melintang 26 orang serta Kecamatan Kinali 25 orang.

Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, yakni pemerintah dan pemerintah Kabupaten/Kota menghapus praktik-praktik yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, baik perempuan maupun anak, menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam



segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, olah raga, seni dan budaya, serta pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi. Sedangkan hak-haknya adalah bahwa setiap penyandang disabilitas harus bebas dari peniksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.

Langkah yang perlu ditempuh pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam rangka memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap penyandang disabilitas yakni menjamin akses penyandang disabilitas terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi dan komunikasi, termasuk teknologi dan sistem informasi dan komunikasi, serta fasilitas dan pelayanan lainnya yang terbuka atau sarana umum baik di daerah perkotaan maupun pedesaan, atas dasar kesetaraan dimana dalamnya harus termasuk identifikasi dan penghapusan semua hambatan terhadap aksesibilitas.

Berkaitan dengan akses kerja penyandang cacat, komitmen pemerintah dalam peningkatan persamaan hak untuk memperoleh kesempatan kerja bagi setiap orang Indonesia termasuk penyandang cacat telah tertuang dan diamanatkan dalam UUD 1945, Pasal 27 : (2) Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan Pasal 28 D : (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Kebijakan dan program Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, bahwa Dalam optimalisasi persamaan hak bagi penyandang cacat dan untuk memperoleh pekerjaan yang layak, berbagai upaya telah dilakukan secara koordinatif dan berkelanjutan, dengan mengacu pada peraturan perundangundangan. Bagi tenaga kerja penyandang cacat yang tidak tertampung di Sektor Formal diarahkan pada Sektor Informal dengan Program Pemberdayaan Tenaga Kerja Penyandang Cacat dimaksudkan untuk mendorong menumbuhkan iklim Usaha Mandiri dengan cara

memberikan pelatihan kewirausahaan, Bimbingan/Panduan Usaha baik perorangan maupun kelompok.

3. Mobilitas Penduduk

Perpindahan penduduk (migrasi atau mobilitas) merupakan salah satu dari tiga komponen utama pertumbuhan penduduk yang dapat menambah atau mengurangi jumlah penduduk. Komponen ini bersama dengan kelahiran dan kematian mempengaruhi dinamika penduduk di suatu wilayah seperti jumlah, komposisi, dan distribusi keruangan. Tinjauan migrasi secara regional sangat penting dilakukan terutama terkait dengan kepadatan dan distribusi penduduk yang tidak merata, adanya faktor-faktor pendorong dan penarik bagi penduduk untuk melakukan migrasi, kelancaran sarana transportasi antar wilayah, dan pembangunan wilayah dalam kaitannya dengan desentralisasi pembangunan.

Analisis dan perkiraan besaran dan arus perpindahan penduduk (migrasi atau mobilitas) merupakan hal yang penting bagi terlaksananya pembangunan manusia seutuhnya. Pada hakekatnya migrasi penduduk merupakan refleksi perbedaan pertumbuhan ekonomi dan ketidakmerataan fasilitas pembangunan antara satu daerah dengan daerah lain. Penduduk dari daerah yang tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah akan berpindah menuju daerah yang mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Namun pada sisi lain, aliran ekonomi baru migrasi (*new economics of migration*) beranggapan bahwa perpindahan penduduk terjadi bukan saja berkaitan dengan pasar kerja, namun juga karena adanya faktor-faktor lain. Keputusan untuk melakukan migrasi tidak semata-mata merupakan keputusan individu, namun terkait dengan lingkungan sekitar, utamanya lingkungan keluarga dan kondisi daerah yang ditinggali maupun yang dituju. Lingkungan sekitar ini termasuk juga kondisi politik, agama, dan bencana alam.

Dari kedua teori di atas jelas, bahwa migrasi disebabkan oleh faktor pendorong (*push factor*) suatu wilayah dan faktor penarik (*pull factor*) wilayah lainnya. Faktor pendorong suatu wilayah menyebabkan orang pindah ke tempat lain, misalnya karena di daerah itu tidak tersedia sumber daya yang memadai untuk memberikan jaminan kehidupan bagi penduduknya. Perpindahan penduduk ini juga terkait dengan persoalan kemiskinan dan pengangguran yang terjadi di suatu wilayah. Sedangkan faktor penarik



suatu wilayah adalah jika wilayah tersebut mampu atau dianggap mampu menyediakan fasilitas dan sumber-sumber penghidupan bagi penduduk, baik penduduk di wilayah itu sendiri maupun penduduk di sekitarnya dan daerah-daerah lain. Penduduk wilayah sekitarnya dan daerah-daerah lain yang merasa tertarik dengan daerah tersebut kemudian berpindah dalam rangka meningkatkan taraf hidup.

a. Migrasi Masuk

Jumlah penduduk dari luar Provinsi Sumatera Barat yang masuk ke Kabupaten Pasaman Barat selama tahun 2019 sebanyak 7.001 orang (57,62%), sedangkan yang berasal dari Luar Kabupaten dalam Provinsi Sumatera Barat sebanyak 5.150 orang (42,38%) sehingga jumlah keseluruhan penduduk yang masuk ke Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 12.151 orang.

Tabel III.33 Jumlah Migrasi Masuk Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019

NO	KECAMATAN	Luar Provinsi		Luar Kabupaten Dalam Satu Provinsi		Jumlah Migrasi Masuk	
		n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n	%
1	SUNGAI BEREMAS	553	4.55	195	1.60	748	6.16
2	LEMBAH MELINTANG	566	4.66	231	1.90	797	6.56
3	PASAMAN	1,039	8.55	1,463	12.04	2,502	20.59
4	TALAMAU	400	3.29	643	5.29	1,043	8.58
5	KINALI	800	6.58	875	7.20	1,675	13.78
6	GUNUNG TULEH	358	2.95	270	2.22	628	5.17
7	RANAH BATAHAN	761	6.26	247	2.03	1,008	8.30
8	KOTO BALINGKA	702	5.78	134	1.10	836	6.88
9	SUNGAI AUR	994	8.18	423	3.48	1,417	11.66
10	LUHAK NAN DUO	580	4.77	488	4.02	1,068	8.79
11	SASAK RANAH PESISIR	248	2.04	181	1.49	429	3.53
TOTAL		7,001	57.62	5,150	42.38	12,151	100

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2019 Ditjen Duk-Capil Kemendagri, diolah

Tabel III.42. menunjukkan bahwa migran masuk dari luar Kabupaten Pasaman Barat tersebar di sebelas kecamatan. Kecamatan terbanyak yang menerima migran dari luar Kabupaten Pasaman Barat adalah Kecamatan Pasaman yaitu sebanyak 2.502 orang (20,59%), diikuti dengan Kecamatan Kinali sebanyak 1,675 orang (13,78%), dan Kecamatan Sungai Aur sebanyak 1.417 orang (11,66%). Sementara Kecamatan yang paling sedikit menerima migran adalah Kecamatan Sasak Ranah Pesisir sebanyak 429 orang (3,53%).

Migran masuk dari luar Kabupaten Pasaman Barat dapat dilihat dari beberapa karakteristik misalnya dari jenis kelamin sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.34 Jumlah Migrasi Masuk Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019
Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin

NO	KECAMATAN	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
		n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%
1	SUNGAI BEREMAS	418	3.44	330	2.72	748	6.16
2	LEMBAH MELINTANG	415	3.42	382	3.14	797	6.56
3	PASAMAN	1,202	9.89	1,300	10.70	2,502	20.59
4	TALAMAU	565	4.65	478	3.93	1,043	8.58
5	KINALI	898	7.39	777	6.39	1,675	13.78
6	GUNUNG TULEH	311	2.56	317	2.61	628	5.17
7	RANAH BATAHAN	562	4.63	446	3.67	1,008	8.30
8	KOTO BALINGKA	438	3.60	398	3.28	836	6.88
9	SUNGAI AUR	673	5.54	744	6.12	1,417	11.66
10	LUHAK NAN DUO	534	4.39	534	4.39	1,068	8.79
11	SASAK RANAH PESISIR	259	2.13	170	1.40	429	3.53
TOTAL		6,275	51.64	5,876	48.36	12,151	100

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2019 Ditjen Duk-Capil Kemendagri, diolah

Data yang ditampilkan pada tabel III.43 menunjukkan bahwa proporsi migran yang datang ke Kabupaten Pasaman Barat lebih banyak migran laki-laki yaitu berjumlah 6.275 orang (51,64%), sementara migran perempuan berjumlah 5.876 orang (48,36%).

b. Migrasi Keluar

Jumlah penduduk dari Kabupaten Pasaman Barat yang pindah keluar Kabupaten luar Propinsi Sumatera Barat selama tahun 2019 sebanyak 3.526 jiwa (61,27%), sedangkan penduduk dari Kabupaten Pasaman Barat yang pindah keluar Kabupaten Pasaman Barat tapi masih di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 2.229 jiwa (38,73%) sehingga jumlah keseluruhan penduduk yang pindah keluar Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 5.755 jiwa.

Tabel III.35 Jumlah Migrasi Keluar Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019

NO	KECAMATAN	Luar Provinsi		Luar Kabupaten Dalam Satu Provinsi		Jumlah Migrasi Keluar	
		n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n	%
1	SUNGAI BEREMAS	315	5.47	151	2.62	466	8.10
2	LEMBAH MELINTANG	363	6.31	156	2.71	519	9.02
3	PASAMAN	523	9.09	523	9.09	1,046	18.18
4	TALAMAU	233	4.05	239	4.15	472	8.20
5	KINALI	587	10.20	451	7.84	1,038	18.04
6	GUNUNG TULEH	115	2.00	77	1.34	192	3.34
7	RANAH BATAHAN	217	3.77	71	1.23	288	5.00
8	KOTO BALINGKA	226	3.93	79	1.37	305	5.30
9	SUNGAI AUR	404	7.02	139	2.42	543	9.44
10	LUHAK NAN DUO	412	7.16	268	4.66	680	11.82
11	SASAK RANAH PESISIR	131	2.28	75	1.30	206	3.58
TOTAL		3,526	61.27	2,229	38.73	5,755	100

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2019 Ditjen Duk-Capil Kemendagri, diolah



Tabel III.44. menunjukkan bahwa migran keluar Kabupaten Pasaman Barat tersebar di sebelas kecamatan. Kecamatan dengan jumlah migran keluar terbanyak di Kabupaten Pasaman Barat adalah Kecamatan Pasaman yaitu sebanyak 1.046 jiwa (18,18%), diikuti dengan Kecamatan Kinali sebanyak 1.038 jiwa (18,04%), Kecamatan Luhak Nan Duo sebanyak 680 jiwa (11,82%). Sementara Kecamatan dengan jumlah migran keluar paling sedikit adalah Kecamatan Gunung Tuleh sebanyak 192 jiwa (3,34%).

Migran keluar Kabupaten Pasaman Barat dapat dilihat dari beberapa karakteristik misalnya dari jenis kelamin. Data yang ditampilkan pada tabel III.45. menunjukkan bahwa proporsi migran keluar Kabupaten Pasaman Barat lebih banyak terdapat pada penduduk Perempuan yaitu sebanyak 2.885 jiwa (50,13%) dibanding dengan penduduk Laki-laki yaitu sebanyak 2.870 jiwa (49,87%).

Tabel III.36 Jumlah Migrasi Keluar Kabupaten Pasaman Barat Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2019

NO	KECAMATAN	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
		n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%
1	SUNGAI BEREMAS	227	3.94	239	4.15	466	8.10
2	LEMBAH MELINTANG	251	4.36	268	4.66	519	9.02
3	PASAMAN	522	9.07	524	9.11	1046	18.18
4	TALAMAU	236	4.10	236	4.10	472	8.20
5	KINALI	550	9.56	488	8.48	1038	18.04
6	GUNUNG TULEH	99	1.72	93	1.62	192	3.34
7	RANAH BATAHAN	139	2.42	149	2.59	288	5.00
8	KOTO BALINGKA	150	2.61	155	2.69	305	5.30
9	SUNGAI AUR	263	4.57	280	4.87	543	9.44
10	LUHAK NAN DUO	333	5.79	347	6.03	680	11.82
11	SASAK RANAH PESISIR	100	1.74	106	1.84	206	3.58
KABUPATEN PASAMAN BARAT		2,870	49.87	2,885	50.13	5,755	100

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2019 Ditjen Duk-Capil kemendagri, diolah

c. Migrasi Netto

Migrasi Netto merupakan angka yang menunjukkan selisih antara migrasi masuk dan migrasi keluar dengan cara memperhitungkan antara jumlah migran yang masuk dan keluar pada tahun yang sama dan jumlah penduduk daerah asal pada pertengahan. Jika migrasi masuk lebih besar dari migrasi keluar maka diperoleh Angka Migrasi Netto yang bernilai positif dan sebaliknya jika migrasi masuk lebih kecil dari migrasi keluar, Angka Migrasi Netto akan bernilai negatif.

Berdasarkan data SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, diperoleh angka migrasi masuk sebesar 12.151 jiwa dan

angka migrasi keluar sebesar 5.755 jiwa. Dari perhitungan migrasi netto, diperoleh angka migrasi netto untuk Kabupaten Pasaman Barat sebesar 14,78 sehingga dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Pasaman Barat mempunyai angka migrasi netto positif. Artinya bahwa kedatangan penduduk baru di Kabupaten Pasaman Barat lebih besar dibandingkan dengan penduduk yang keluar.

Tabel III.37. Jumlah Migrasi Netto Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019

NO	KECAMATAN	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2019	Migrasi Masuk	Migrasi Keluar	Migrasi Netto
1	SUNGAI BEREMAS	27,420	748	466	10.28
2	LEMBAH MELINTANG	49,880	797	519	5.57
3	PASAMAN	75,592	2,502	1,046	19.26
4	TALAMAU	30,714	1,043	472	18.59
5	KINALI	70,854	1,675	1,038	8.99
6	GUNUNG TULEH	24,615	628	192	17.71
7	RANAH BATAHAN	27,176	1,008	288	26.49
8	KOTO BALINGKA	30,440	836	305	17.44
9	SUNGAI AUR	35,637	1,417	543	24.53
10	LUHAK NAN DUO	45,012	1,068	680	8.62
11	SASAK RANAH PESIRIR	15,331	429	206	14.55
TOTAL		432,668	12,151	5,755	14.78

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2019 Ditjen Duk-Capil Kemendagri, diolah

Ada 2 sisi interpretasi yang dapat diberikan dengan keadaan ini, yang pertama Kabupaten Pasaman Barat dianggap cukup kondusif dan aman, sehingga banyak penduduk yang datang dan menetap serta melakukan aktivitas ekonomi di Kabupaten Pasaman Barat yang juga di topang karena Kabupaten Pasaman Barat merupakan daerah pemekaran yang baru berkembang sehingga peluang lapangan pekerjaan dan sumber daya alam yang berlimpah menjadi pemikat bagi penduduk dari luar Kabupaten Pasaman Barat. Kedua, besarnya penduduk yang datang secara tidak langsung akan memberatkan APBD, karena pemerintah daerah harus menyiapkan berbagai infrastruktur untuk masyarakatnya. Pembiayaan pendidikan, pembiayaan kesehatan akan semakin berat, permasalahan sosial akan muncul seperti berbagai tindak kriminal, kawasan hijau semakin berkurang akibat kebutuhan tempat tinggal dan tempat berkebun, jumlah kendaraan terus bertambah dan suatu saat dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas yang pada gilirannya akan menambah tingginya suhu udara.



4. Kepemilikan Dokumen Kedudukan

Dokumen Kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Akta Perkawinan/Perceraian wajib dimiliki oleh penduduk Indonesia. Dokumen kependudukan ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara perdata bagi pemiliknya. Misalnya akta kelahiran, menunjukkan hubungan perdata dari pemilik akta dengan orang tuanya, akta kematian juga menunjukkan hubungan perdata dengan ahli waris, demikian pula akta-akta yang lain. Kepemilikan dokumen ini selain mempunyai kekuatan legal, juga dapat digunakan untuk memperoleh pelayanan sosial dasar yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara bagi pemerintah, kepemilikan dokumen kependudukan bermanfaat dalam melakukan kegiatan pengadministrasian penduduk berdasarkan hak legalnya, serta memperkuat database penduduk serta pelayanan publik.

a. Kepemilikan Kartu Keluarga

Kartu Keluarga merupakan salah satu dari beberapa dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh keluarga. Kartu keluarga menunjukkan hubungan kekerabatan antara kepala keluarga dengan anggota keluarganya. Untuk menghindari kepala keluarga ganda, maka perempuan bisa menjadi kepala keluarga karena status perkawinannya janda maupun karena menjadi istri kedua, ketiga maupun keempat dari seorang laki-laki, sesuai kesepakatan didalam keluarga tersebut.

Seorang kepala keluarga bertanggung jawab terhadap anggota keluarga. Kartu Keluarga (KK) merupakan kartu identitas yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga seperti umur, jenis kelamin, status perkawinan, status kegiatan, status pekerjaan, status kecacatan dan lain sebagainya.

Tabel III.38 Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah KK	Belum Memiliki KK	Kepemilikan KK	Persentase Kepemilikan KK (%)
1	SUNGAI BEREMAS	6,656	1,787	4,869	73.15
2	LEMBAH MELINTANG	12,028	4,445	7,583	63.04
3	PASAMAN	20,244	4,030	16,214	80.09
4	TALAMAU	8,136	2,207	5,929	72.87
5	KINALI	18,551	4,013	14,538	78.37
6	GUNUNG TULEH	6,565	2,026	4,539	69.14
7	RANAH BATAHAN	7,365	2,330	5,035	68.36

8	KOTO BALINGKA	7,765	2,706	5,059	65.15
9	SUNGAI AUR	8,977	2,513	6,464	72.01
10	LUHAK NAN DUO	12,062	3,183	8,879	73.61
11	SASAK RANAH PESISIR	4,088	1,176	2,912	71.23
PASAMAN BARAT		112,437	30,416	82,021	72.95

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2019 Ditjen Duk-Capil Kemendagri, diolah

Tabel III.47. menunjukkan jumlah keluarga dan jumlah keluarga yang memiliki Kartu Keluarga di Kabupaten Pasaman Barat. Dari 112,437 kepala keluarga ternyata sebanyak 82.021 telah memiliki Kartu Keluarga. Yang perlu diperhatikan ternyata ada 30.416 keluarga yang tidak memiliki KK (27,05%) sehingga perlu dicari faktor penyebabnya. Bila menurut kecamatan, maka persentase kepemilikan KK yang paling rendah di Kecamatan Lembah Melintang (63,04%) dan Kecamatan Koto Balingka (65,15%). Sedangkan persentase kepemilikan Kartu Keluarga yang paling tinggi terdapat di Kecamatan Pasaman (80,09%).

b. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

Kartu Tanda penduduk (KTP) merupakan salah satu identitas legal bagi penduduk yang menjadi bukti bahwa orang tersebut diakui sebagai penduduk di suatu wilayah administrasi di Indonesia. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2006, KTP wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia yang sudah berumur 17 tahun ke atas atau mereka yang di bawah 17 tahun tetapi sudah pernah kawin, dalam profil ini disebut penduduk wajib KTP. Dengan memiliki KTP penduduk dapat dengan mudah mengurus semua yang berkaitan dengan legalitas serta memperoleh pelayanan sosial dan ekonomi dasar lainnya; misalnya urusan perbankan, mengurus sertifikat tanah, mengurus perkawinan, pendidikan, pekerjaan dan sebagainya.

Tabel III.39 Persentase Kepemilikan KTP-el di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Menurut Kecamatan

NO	KECAMATAN	JUMLAH (JIWA)						
		Wajib KTP			Kepemilikan KTP-el			
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%
1	SUNGAI BEREMAS	9,060	8,807	17,867	7,877	7,927	15,804	88.45
2	LEMBAH MELINTANG	16,104	16,508	32,612	14,410	15,167	29,577	90.69
3	PASAMAN	25,511	25,610	51,121	23,254	24,095	47,349	92.62
4	TALAMAU	10,899	10,530	21,429	9,613	9,601	19,214	89.66
5	KINALI	24,031	23,448	47,479	21,391	21,500	42,891	90.34
6	GUNUNG TULEH	8,344	8,307	16,651	7,602	7,784	15,386	92.40
7	RANAH BATAHAN	9,244	9,280	18,524	8,416	8,559	16,975	91.64
8	KOTO BALINGKA	9,970	10,130	20,100	8,741	9,080	17,821	88.66
9	SUNGAIAUR	11,777	11,717	23,494	10,380	10,561	20,941	89.13



10	LUHAK NAN DUO	15,138	15,112	30,250	14,139	14,332	28,471	94.12
11	SASAK RANAH PESISIR	5,363	5,264	10,627	4,860	4,863	9,723	91.49
KABUPATEN PASAMAN BARAT		145,441	144,713	290,154	130,683	133,469	264,152	91.04

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2019 Ditjen Duk-Capil Kemendagri, diolah

Tabel III.48. menunjukkan bahwa dari 290.154 jiwa wajib KTP-el pada Tahun 2019, sebanyak 264.152 jiwa penduduk atau sebesar 91.04% sudah memiliki KTP-el. Persentase penduduk terbesar yang telah memiliki KTP-el berada di Kecamatan Luhak Nan Duo yaitu sebesar 94,12%, disusul Kecamatan Pasaman sebesar 92,62% dan Kecamatan Gunung Tuleh 92,40%. Sedangkan persentase penduduk terkecil yang telah memiliki KTP-el berada di Kecamatan Sungai Beremas yaitu sebesar 88,45%.

c. Kepemilikan Akta

Akta merupakan dokumen kependudukan yang sangat penting dan wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia. Akta merupakan pengakuan Negara atas status keperdataan seseorang baik dalam hubungan kekeluargaan maupun dalam hubungannya dengan pelayanan legal lainnya. Akta-akta yang dimaksud meliputi akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan dan akta perceraian.

1) Akta Kelahiran

Akta Kelahiran merupakan bukti legal hubungan keperdataan seorang anak dengan ayah dan ibunya. Dalam akta tersebut dijelaskan tentang siapa nama orang tua baik ayah maupun ibunya. Jika seorang ibu melahirkan tanpa ayah atau status perkawinannya tidak terdaftar, maka dalam akta kelahiran hanya dicantumkan nama ibunya, sehingga dalam hal ini si anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Akta kelahiran penting untuk dimiliki oleh seorang anak karena digunakan pada saat mengurus pendidikan atau mengurus dokumen lainnya seperti paspor.

Tabel III.40 Jumlah dan Proporsi Kepemilikan Akta Kelahiran Kab. Pasaman Barat Tahun 2019 Menurut Kecamatan

Tahun 2019 menurut Kecamatan									
NO	KECAMATAN	KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN						JUMLAH PENDU DUK	PERSEN TASE KEPEMILIK AN AKTA KELAHIR AN
		ADA			BELUM				
		LK	PR	Jumlah	LK	PR	Jumlah		
		n	n	n	n	n	n		
1	SUNGAI BEREMAS	6,360	6,117	12,477	7,755	7,259	15,014	27,491	45.39
2	LEMBAH MELINTANG	11,859	11,991	23,850	13,194	12,915	26,109	49,959	47.74
3	PASAMAN	17,479	17,483	34,962	20,830	20,178	41,008	75,970	46.02

4	TALAMAU	6,706	6,464	13,170	8,986	8,443	17,429	30,599	43.04
5	KINALI	15,523	15,248	30,771	20,759	19,591	40,350	71,121	43.27
6	GUNUNG TULEH	5,797	5,647	11,444	6,784	6,577	13,361	24,805	46.14
7	RANAH BATAHAN	6,115	6,094	12,209	7,667	7,549	15,216	27,425	44.52
8	KOTO BALINGKA	7,294	7,262	14,556	8,136	8,024	16,160	30,716	47.39
9	SUNGAI AUR	8,260	8,227	16,487	9,936	9,407	19,343	35,830	46.01
10	LUHAK NAN DUO	10,158	9,914	20,072	12,440	11,997	24,437	44,509	45.10
11	SASAK RANAH PESISIR	3,168	3,158	6,326	4,637	4,373	9,010	15,336	41.25
KABUPATEN PASAMAN BARAT		98,719	97,605	196,324	121,124	116,313	237,437	433,761	45.26

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2019 Ditjen Duk-Capil Kemendagri, diolah

Tabel III.49. menggambarkan kepemilikan akta kelahiran penduduk Kabupaten Pasaman Barat menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin terhadap total penduduk Kabupaten Pasaman Barat, terlihat bahwa persentase kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Pasaman Barat sebesar 45,26% (196.324 orang), sedangkan 237.437 orang penduduk (54,74%) belum mempunyai akta kelahiran. Data ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh penduduk Kabupaten Pasaman Barat belum mempunyai Akta Kelahiran. Hal ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk membuat langkah-langkah terobosan agar persentase kepemilikan akta kelahiran ini dapat meningkat pada tahun-tahun berikutnya.

2) Akta Kematian

Akta Kematian merupakan bukti legal hubungan keperdataan pemilik akta dengan ahli warisnya. Dalam akta tersebut dijelaskan tentang siapa nama orang tua baik ayah maupun ibunya, data tentang tempat dan tanggal lahir serta data tentang tempat dan tanggal kematian. Akta kematian penting untuk dimiliki oleh seorang karena digunakan oleh ahli waris yang bersangkutan pada saat mengurus pensiun kematian, serta hak waris lainnya.

Tabel III.41 Jumlah dan Proporsi Kepemilikan Akta Kematian Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Menurut Kecamatan

NO	KECAMATAN	Jumlah Penduduk	Kepemilikan Akta	n(Jiwa)
		Meninggal (Jiwa)	Kematian (Jiwa)	%
1	SUNGAI BEREMAS	793	303	38.21
2	LEMBAH MELINTANG	1,880	871	46.33
3	PASAMAN	2,427	1,266	52.16
4	TALAMAU	1,451	608	41.90
5	KINALI	2,026	870	42.94
6	GUNUNG TULEH	1,123	499	44.43
7	RANAH BATAHAN	1,102	546	49.55
8	KOTO BALINGKA	1,182	669	56.60
9	SUNGAI AUR	1,257	631	50.20



10	LUHAK NAN DUO	1,602	915	57.12
11	SASAK RANAH PESISIR	524	283	54.01
KABUPATEN PASAMAN BARAT		15,367	7,461	48.55

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2019 Ditjen Duk-Capil Kemendagri, diolah

Jumlah pengurusan akta kematian di Kabupaten Pasaman Barat selama tahun 2019 tercatat sebanyak 7.461 orang. Jumlah ini masih sangat kecil dibandingkan jumlah penduduk yang dilaporkan meninggal dunia. Hal utama yang menyebabkan sedikitnya pengurusan akta kematian ini adalah karena masyarakat menganggap akta kematian bukanlah suatu dokumen yang penting untuk diurus apabila tidak ada keperluan atau urusan yang mensyaratkan akta kematian sebagai salah satu kelengkapannya.

3) Akta Perkawinan / Surat Nikah

Akta perkawinan/surat nikah merupakan identitas atas penduduk yang bersetatus kawin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akta perkawinan/status kawin memberikan kekuatan hukum atas ikatan antara laki-laki dan perempuan dalam bentuk keluarga dengan seluruh hak dan kewajiban yang melekat didalamnya.

Tabel III.42 Jumlah dan Proporsi Kepemilikan Akta Perkawinan/Surat Nikah di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Menurut Kecamatan

NO	KECAMATAN	Jumlah Penduduk	Kepemilikan Akta	n(Jiwa)
		Status Kawin (Jiwa)	Perkawinan (Jiwa)	%
1	SUNGAI BEREMAS	11,031	4,003	36.29
2	LEMBAH MELINTANG	19,061	7,093	37.21
3	PASAMAN	34,061	11,913	34.98
4	TALAMAU	13,078	5,777	44.17
5	KINALI	32,148	11,151	34.69
6	GUNUNG TULEH	10,184	4,141	40.66
7	RANAH BATAHAN	11,497	4,014	34.91
8	KOTO BALINGKA	12,331	5,012	40.65
9	SUNGAI AUR	14,399	5,206	36.16
10	LUHAK NAN DUO	20,035	8,136	40.61
11	SASAK RANAH PESISIR	6,858	2,664	38.85
KABUPATEN PASAMAN BARAT		184,683	69,110	37.42

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2019 Ditjen Duk-Capil Kemendagri, diolah

Tabel III.50. menggambarkan persentase penduduk berstatus kawin terhadap kepemilikan akta perkawinan/surat nikah, terlihat bahwa jumlah penduduk Kabupaten Pasaman Barat yang berstatus kawin sebanyak 184.683 orang dan yang memiliki akta kawin/surat nikah hanya 37,42% atau sebanyak 69.110 orang, sedangkan yang tidak memiliki akta kawin/surat nikah

persentasenya cukup tinggi yakni 62,58% (184.683 orang). Hal ini biasa ditemukan diseluruh indonesia, karena ada diantara penduduk terutama penduduk muslim yang melakukan perkawinan secara agama saja, sehingga perkawinan ini tidak diakui secara hukum negara atau penduduk berstatus kawin yang tidak memiliki akta kawin ini diduga belum mencatatkan akta kawin (buku nikah) ke Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil, karena perkawinan mereka dicatat oleh KUA setempat.

Perlu menjadi catatan bahwa masih ada 115.573 orang penduduk berstatus kawin yang tidak memiliki akta perkawinan/surat nikah. Salah satu penyebabnya adalah kurang lengkapnya pengisian formulir biodata penduduk.

Peran pemerintah sangat diperlukan guna mendata penduduk berstatus kawin lebih lengkap khususnya bagi penduduk muslim. Jika kondisi di lapangan memang demikian, pemerintah perlu memprogramkan pendataan kepemilikan dokumen perkawinan untuk muslim bahkan tidak menutup kemungkinan melaksanakan program perkawinan masal bagi yang sudah menikah jika masih banyak penduduk yang tidak memiliki dokumen perkawinan.

4) Akta Perceraian / Surat Cerai

Akta perceraian/surat cerai merupakan dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh penduduk yang berstatus cerai hidup. Tabel. III.51. menggambarkan jumlah dan proporsi penduduk Kabupaten Pasaman Barat berstatus cerai hidup yang memiliki akta perceraian. Terlihat bahwa dari total sebanyak 4.485 jiwa penduduk berstatus cerai hidup, yang memiliki akta perceraian/surat cerai hanya sebanyak 966 jiwa (21,54%) dan umumnya penduduk yang berstatus cerai hidup tidak memiliki akta perceraian/surat cerai. Besarnya penduduk berstatus cerai yang tidak memiliki akta perceraian diduga karena penduduk tersebut tidak mencatatkan perceraianya

Tabel III.43 Persentase Kepemilikan Akta Perceraian/Surat Cerai di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Penduduk Status	Kepemilikan Akta	n(Jiwa) %
		Cerai Hidup (Jiwa)	Perceraian (Jiwa)	
1	SUNGAI BEREMAS	208	40	19.23
2	LEMBAH MELINTANG	521	83	15.93
3	PASAMAN	1,008	246	24.40
4	TALAMAU	325	65	20.00



5	KINALI	612	177	28.92
6	GUNUNG TULEH	275	37	13.45
7	RANAH BATAHAN	278	42	15.11
8	KOTO BALINGKA	297	36	12.12
9	SUNGAIAUR	359	70	19.50
10	LUHAK NAN DUO	457	154	33.70
11	SASAK RANAH PESISIR	145	16	11.03
KABUPATEN PASAMAN BARAT		4,485	966	21.54

umber : Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2019 Ditjen Duk-Capil Kemendagri, diolah

Jumlah dan proporsi kepemilikan akta perceraian/surat cerai ini perlu menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam merencanakan suatu program kegiatan seperti penyuluhan akan pentingnya akta perceraian. Kurang pahamnya penduduk terhadap pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan dapat diduga akibat kurangnya sosialisasi kepada penduduk. Jika kondisi ini dibiarkan akan menimbulkan permasalahan lain misalnya dalam pengurusan hak waris, yang pada akhirnya akan berdampak kepada pemerintah daerah.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Data kependudukan dapat memberikan gambaran mengenai status data kependudukan yang ada saat ini di Kabupaten Pasaman Barat. Dari gambaran tersebut dapat memberikan sejumlah rekomendasi untuk menyusun kebijakan daerah, penelitian, dan sebagai dasar bagi pendataan yang lain yang berkaitan dengan kependudukan. Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 ini agar dapat digunakan oleh instansi pemerintah/swasta maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan. Dalam buku ini telah disajikan data kependudukan berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2019 yang telah diolah, data perkembangan kependudukan perkecamatan khususnya untuk data yang terkait migrasi penduduk (pindah dan datang) dan data terkait kematian dan kepemilikan akta kematian, serta data pendukung dari lintas sektor, Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Instansi teknis terkait yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman Barat..

Selanjutnya untuk mengetahui lebih lanjut tentang kondisi ke depan tentang penduduk dan permasalahannya, maka Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Pasaman Barat ini akan disajikan secara berkala. Data yang valid dan akurat juga sangat tergantung pada karakter dan perilaku masyarakat sendiri, sehingga diharapkan masyarakat yang melakukan registrasi di tingkat Kenagarian, Kecamatan ataupun di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat dapat memberikan dan mengisi biodatanya dengan benar dan lengkap serta tidak terlambat melakukan registrasi dan melaporkan apabila terjadi peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pindah dan datang.

B. SARAN

Demikian buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 ini disusun dan sajikan. Kami menyadari, Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 ini masih jauh dari sempurna. Kami berharap kritikan dan saran yang membangun, baik dari pengguna data maupun pemerhati masalah kependudukan, demi sempurnanya penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan



Kabupaten Pasaman Barat di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Semoga buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 ini berguna bagi kita semua, khususnya pengambil kebijakan dalam pembangunan yang berwawasan kependudukan.